



BADAN POM RI



LAPORAN KINERJA 2017

INSPEKTORAT BADAN POM

Jl. Percetakan Negara 23 Gedung I Lantai 2

Email: inspektorat.bpom@yahoo.com Telp: 021 4246726

KATA PENGANTAR INSPEKTUR



Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2017 dapat disusun tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Laporan kinerja ini berfungsi sebagai perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), media penilaian kinerja, media penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan terkait, sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Secara umum sasaran yang dicapai telah sesuai dengan yang direncanakan, namun demikian terdapat beberapa yang belum sesuai dikarenakan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan komitmen, kerjasama dan dukungan aktif dari unit kerja lain di lingkungan Badan POM.

Laporan Kinerja Inspektorat 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan membantu kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* di masa yang akan datang melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Jakarta, Januari 2018
Inspektur Badan POM,

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat 2017 merupakan perwujudan akuntabilitas Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2017 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2017. Rencana Kinerja 2017 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat 2015-2019 yang telah direvisi ketiga dengan Keputusan Inspektur Nomor HK.06.02.6.01.16.0013 tentang Revisi Ketiga Rencana Strategis Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 tanggal 4 Januari 2016.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Inspektorat sebagai unit pendukung memiliki 9 Sasaran Strategis, yaitu: (1) Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM; (2) Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB; (3) Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan; (4) Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien; (5) Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan, (6) Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern; (7) Meningkatkan pengelolaan *Human Capital Management* (HCM); (8) Implementasi QMS; dan (9) Meningkatkan akuntabilitas.

Sasaran Strategis tersebut didukung oleh 14 Indikator Sasaran dengan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU Inspektorat tahun 2017 sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penguatan Pengawasan, dengan capaian sebesar 105,24%.
2. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu, dengan capaian sebesar 111,11% .
3. Persentase Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) dengan kriteria “BAIK”, dengan capaian sebesar 119,32% .
4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM, dengan capaian sebesar 98,59%.
5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat, dengan capaian sebesar 97,32%.

Dari kelima indikator di atas, target tercapai dengan capaian diatas 100% dengan kriteria memuaskan adalah Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

bidang Penguatan Pengawasan, Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu, Persentase Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) dengan kriteria “BAIK”. Sedangkan indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM dan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat mengalami penurunan dengan kriteria Cukup.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis dan IKU serta membiayai kegiatan lainnya, Inspektorat memperoleh anggaran TA 2017 sebesar Rp11.614.664.000,00. Realisasi anggaran (Rp9.757.438.068,00) dibandingkan pagu anggaran sebelum dan sesudah *self blocking* berturut-turut adalah sebesar 84,01% dan 95,33%.

Laporan Kinerja Inspektorat ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Inspektorat Badan POM pada tahun 2017 dan untuk selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum Organisasi	2
C Struktur Organisasi	2
D Aspek Strategis	3
E Analisis Lingkungan Strategis	4
1. Internal	4
2. Eksternal	6
F Isu Strategis	7
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A Rencana Strategis	11
a. Pernyataan Visi	11
b. Pernyataan Misi	12
c. Tujuan Strategis	12
d. Sasaran Strategis	14
e. Strategi	16
f. Program	16
B Rencana Kinerja Tahunan 2017	18
C Perjanjian Kinerja 2017	18
D Cara Menghitung Capaian Indikator	19
III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A Capaian Kinerja Organisasi.....	20
I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	20
II. Analisis Akuntabilitas Kinerja	21
B Pencapaian Realisasi Kinerja Terhadap Target 2019	45
C Realisasi Anggaran	47
D Analisis Efisiensi Kegiatan	48

IV	PENUTUP	51
A	Kesimpulan	51
B	Saran	53

DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan 1-1 Struktur Organisasi Badan POM	3
Bagan 1-2 Struktur Organisasi Inspektorat Badan POM	3
Bagan 2-1 Tujuan dan Indikator Tujuan	13
Bagan 2-2 Struktur Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat Badan POM	13

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2-1	Definisi Operasional Indikator	14
Tabel 2-2	Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan Kegiatan di Inspektorat	17
Tabel 2-3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2017	18
Tabel 3-1	Pencapaian Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2017	20
Tabel 3-2	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-1: Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	22
Tabel 3-3	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-2: Meningkatnya Efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	26
Tabel 3-4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-3: Meningkatnya Kepuasan Pemangku Kepentingan	28
Tabel 3-5	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4: Meningkatnya Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	30
Tabel 3-6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5: Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	35
Tabel 3-7	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-6: Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	38
Tabel 3-8	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-7: Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	40
Tabel 3-9	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke- 8: Implementasi QMS	42
Tabel 3-10	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke- 9: Meningkatkan Akuntabilitas	44
Tabel 3-11	Perbandingan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2017 terhadap Target Renstra 2019	46
Tabel 3-12	Anggaran Inspektorat Sebelum <i>Self-Blocking</i>	48
Tabel 3-13	Anggaran Inspektorat Setelah <i>Self-Blocking</i>	48
Tabel 3-14	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2017	48
Tabel 3-15	Efisiensi Per Sasaran terhadap Anggaran Setelah <i>Self-Blocking</i>	50

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Jabatan	4
Gambar 1.2 Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Golongan	5
Gambar 1.3 Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Pendidikan	5

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Keputusan Inspektur Badan POM Nomor HK.06.02.6.04.15.0664 tentang Indikator Utama Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2017
- Lampiran 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2017
- Lampiran 4 Keputusan Inspektur Badan POM Nomor HK.06.02.6.05.16.0903 tentang Revisi Kedua Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Badan POM Tahun 2016
- Lampiran 5 Pengukuran Kinerja Inspektorat Tahun 2017
- Lampiran 6 Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017
- Lampiran 7 Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan Inspektorat Tahun 2017
- Lampiran 8 Pengukuran Kinerja Kegiatan Inspektorat Tahun 2017
- Lampiran 9 Pengukuran Efisiensi Kegiatan Inspektorat Tahun 2017
- Lampiran 10 Sarana dan Prasarana Tahun 2017
- Lampiran 11 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Internal Inspektorat 2017
- Lampiran 12 Hasil Penilaian PM-EPITE Tahun 2017
- Lampiran 13 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2017
- Lampiran 14 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan Tahun 2016 dan 2017
- Lampiran 15 Monitoring Status Temuan Audit Inspektorat Badan POM Tahun Audit s.d. Tahun 2017 Per 31 Desember 2017
- Lampiran 16 Realisasi Pelatihan Pegawai Inspektorat Tahun 2017
- Lampiran 17 Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan *stakeholder*.

Inspektorat Badan POM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Badan POM memiliki kewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pada setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2017 merujuk kepada Rencana Strategis Inspektorat tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2017.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

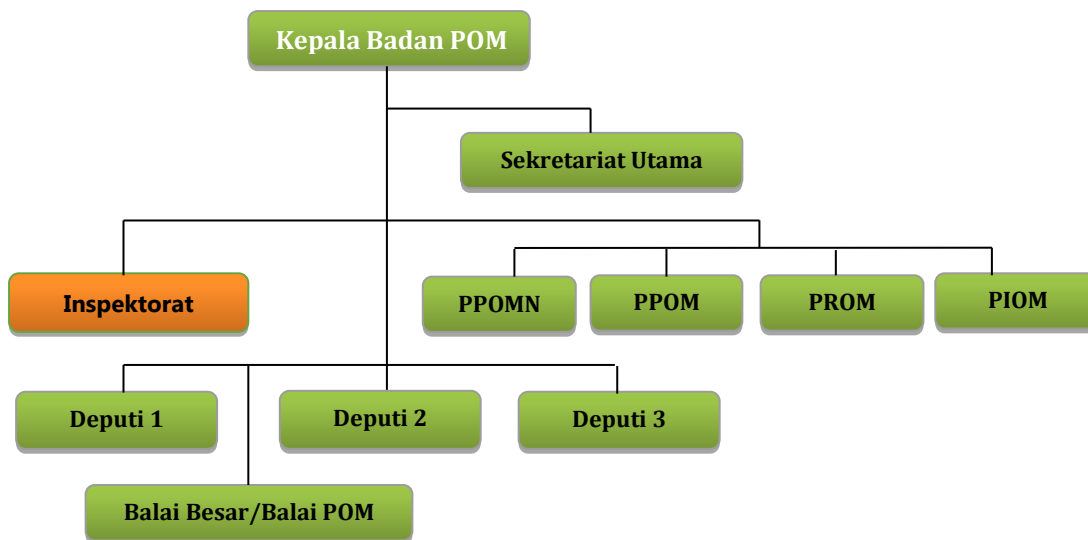
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No.02001/SK/BPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, tugas pokok Inspektorat Badan POM adalah melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan fungsi Inspektorat Badan POM adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan fungsional.
2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh unsur atau Unit di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Secara struktur organisasi Inspektorat Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM. Namun, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Inspektorat Badan POM dikoordinasi oleh Sekretariat Utama Badan POM. Kedudukan Inspektorat Badan POM secara umum ditunjukkan dalam bagan berikut:

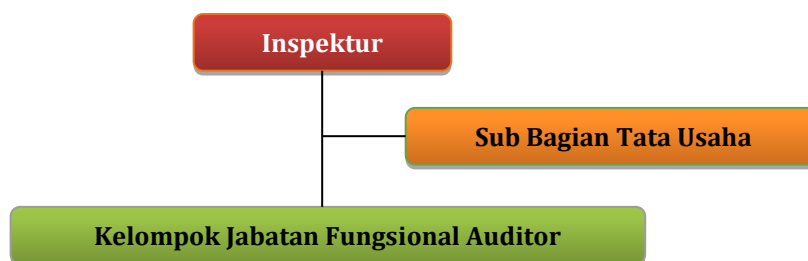


Bagan 1-1. Struktur Organisasi Badan POM

Struktur organisasi Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari:

1. Inspektur
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
3. Sub Bagian Tata Usaha

Sebagaimana terlihat pada Bagan di bawah ini:



Bagan 1-2. Struktur Organisasi Inspektorat Badan POM

D. ASPEK STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan organisasi Badan POM, peran dan fungsi Inspektorat Badan POM juga ikut berkembang. Penguatan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga fungsi pengawasan internal dalam organisasi Badan POM menjadi efektif dan dapat diandalkan. Sebagai pengawas intern, Inspektorat menjadi mata dan telinga dari pimpinan dan dituntut untuk memberikan *early warning system* sebelum terjadi penyimpangan.

Perkembangan ini selaras dengan paradigma APIP yang baru, dimana APIP harus memperluas peran pengawasan yang telah diembannya dengan memberikan fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan *consulting* (konsultasi) kepada manajemen. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan *assurance* seperti reuiu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

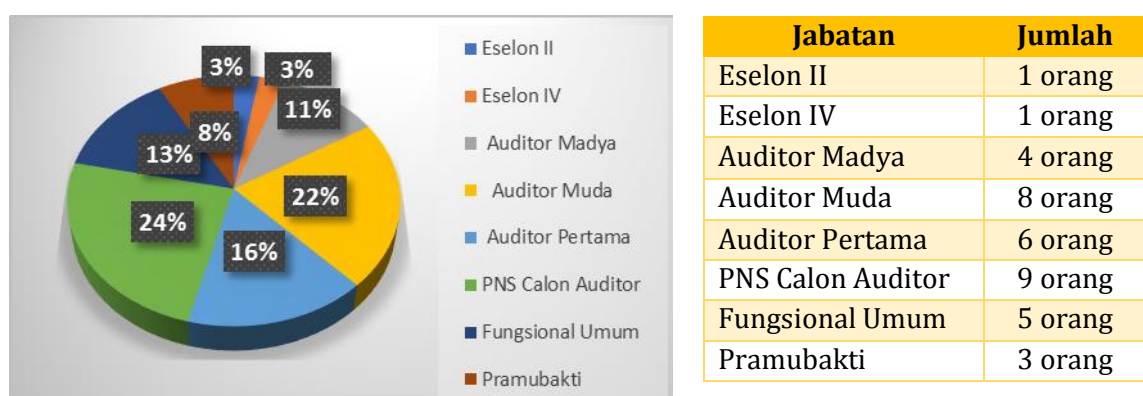
E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas-tugas Inspektorat sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, sarana & prasarana, serta anggaran.

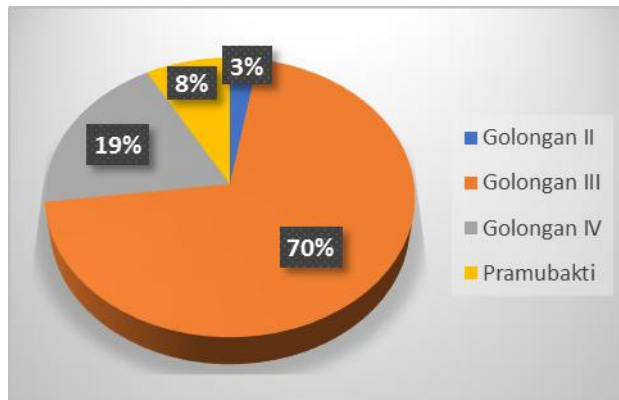
I. Internal

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sampai dengan akhir Desember 2017, jumlah pegawai Inspektorat seluruhnya adalah 37 orang yang terdiri dari 1 (satu) Inspektur, 18 (delapan belas) auditor bersertifikat, 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 5 (lima) staf Tata Usaha, 9 (sembilan) PNS calon auditor, dan 3 (tiga) orang tenaga honorer.

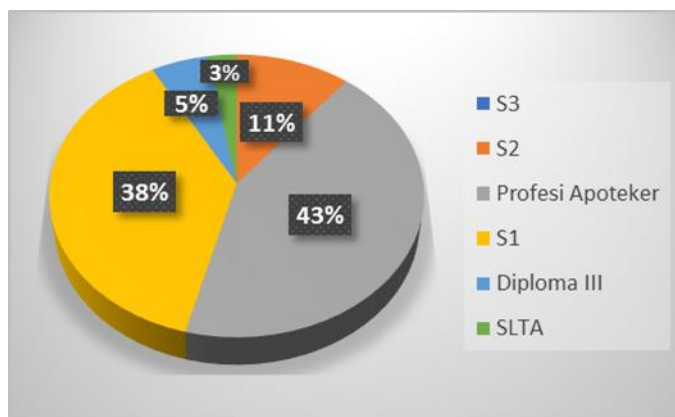


Gambar 1-1. Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Jabatan



GOLONGAN	JUMLAH
Golongan IV	7 Orang
Golongan III	26 Orang
Golongan II	1 Orang
Pramubakti	3 Orang
Jumlah	37 Orang

Gambar 1-2. Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Golongan



PENDIDIKAN	JUMLAH
S3	- Orang
S2	4 Orang
Profesi Apoteker	16 Orang
S1	14 Orang
Diploma III	2 Orang
SLTA	1 Orang
Jumlah	37 Orang

Gambar 1-3. Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Pendidikan

2) Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan dengan Beban Kerja

Inspektorat telah menghitung kebutuhan pegawai untuk jabatan fungsional auditor sebagai berikut:

- a) Kebutuhan pegawai untuk jabatan auditor utama adalah sebanyak 2 orang. Namun pada saat ini belum ada pegawai yang menduduki jabatan tersebut.
- b) Untuk jabatan auditor madya (Pengendali Teknis) dibutuhkan pegawai sebanyak 4 orang. Pada tahun 2017 sudah terdapat 4 orang yang menduduki jabatan auditor madya.
- c) Untuk jabatan auditor muda (Ketua Tim), formasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 8 pegawai. Saat ini sudah ada 8 pegawai yang menduduki jabatan tersebut.

d) Untuk jabatan auditor pertama ataupun auditor terampil (Anggota Tim) dibutuhkan sebanyak 24 pegawai. Sedangkan saat ini jumlah personil yang telah menduduki jabatan auditor pertama adalah sebanyak 6 orang. Saat ini posisi anggota tim ditambah dengan PNS calon auditor sebanyak 9 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 9 pegawai untuk menduduki posisi jabatan auditor pertama. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan tersebut, Inspektorat telah mengadakan rekrutmen melalui seleksi CPNS sebanyak 10 orang yang akan mulai bekerja pada tahun 2018.

3) Sarana dan Prasarana

Inspektorat telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain:

- a) Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Inspektur, Ruang Pengendali Teknis, Ruang Auditor, dan Ruang Tata Usaha
- b) Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas
- c) Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas *assurance*, *consulting* dan administrasi.
- d) Rincian peralatan, meubelair, dan perangkat lainnya tertera pada Lampiran 10.

4) Anggaran

Anggaran yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2017 sebesar Rp11.614.664.000,00. Namun pada tahun berjalan terjadi pemotongan DIPA sebesar Rp1.379.715.000,00 sehingga anggaran setelah pemotongan adalah sebesar Rp10.234.949.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.445.417.238,00 (92,29%).

II. Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan Badan POM yang meliputi:

- a) Satuan Kerja Kedeputan Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza
- b) Satuan Kerja Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen

- c) Satuan Kerja Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
- d) Satuan Kerja Sekretaris Utama
- e) Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
- f) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
- g) Pusat Informasi Obat dan Makanan
- h) Pusat Riset Obat dan Makanan
- i) Satuan Kerja 34 Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia

F. ISU STRATEGIS

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh Badan POM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM yang bersifat strategis, antara lain:

1) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, sehingga masing-masing K/L memiliki kewajiban mencapai target Level 3.

2) Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM Inspektorat secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:

- a) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
- b) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan

- c) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas
- d) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Dalam Pelaksanaan PMPRB di Badan POM, Inspektorat bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB Badan POM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

- a) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB dengan baik.
 - b) Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja.
 - c) Melakukan pelatihan yang cukup bagi Asesor PMPRB.
 - d) Mengikutsertakan pejabat Eselon II sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.
 - e) Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja Badan POM.
 - f) Mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB Badan POM.
 - g) Mengomunikasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).
- 3) Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System/QMS*)

Dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu Badan POM, Inspektorat memiliki fungsi sebagai Koordinator Audit Mutu Internal Badan POM dan bertanggungjawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Audit Mutu Internal, serta mengkoordinir Auditor Mutu Internal Badan POM. Inspektorat turut berkontribusi dalam proses integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu.

- 4) Gerakan Nasional Sapu Bersih Pungutan Liar (Gerakan Nasional Saber Pungli)

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Badan POM telah menindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.1.6.11.16.4051 Tahun 2016 tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Badan POM. Dalam hal ini, Inspektorat selaku Ketua Pelaksana Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Badan POM harus mampu mengkoordinasikan seluruh aktivitas pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar dalam rangka keberhasilan gerakan ini

5) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dasar pembangunan zona integritas adalah pencaanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen pakta integritas. Inspektorat sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut diatas, Inspektorat sebagai APIP Badan POM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi terhadap segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat harus secara berkesinambungan terus meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

6) *Internal Audit Capability Model (IACM)*

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Berdasarkan *assessment* atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM), akan

diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* dari masing-masing APIP.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2017 perihal kapabilitas Inspektorat Badan POM, Inspektorat Badan POM telah berada pada level 3 dengan perbaikan dari 5 level kapabilitas APIP. Untuk itu usulan perbaikan hasil evaluasi BPKP tahun 2017 wajib segera ditindaklanjuti agar dapat menjadi level 3 seutuhnya dan menyusun roadmap/rencana tindak peningkatan kapabilitas menuju ke level selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

a. Pernyataan Visi

Inspektorat Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa**. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat sebagai berikut:

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan
Daya Saing Bangsa**

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Badan POM senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Badan POM selaku unit pengawas internal berusaha menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Badan POM juga berusaha menjadi *agent of change* dalam organisasi Badan POM, menjembatani setiap perubahan

dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Pernyataan Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Badan POM adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Badan POM. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

- 1 •Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- 2 •Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 3 •Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di lingkungan Badan POM akan tumbuh budaya untuk transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

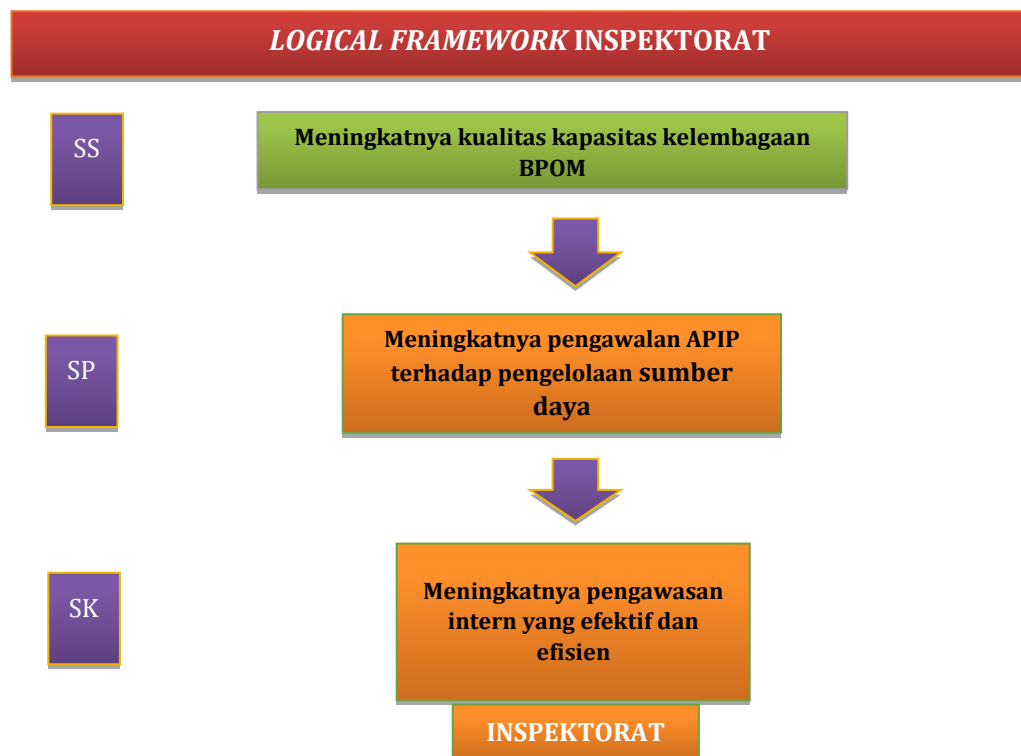
Inspektorat secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

c. Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Badan POM adalah sebagai berikut:



Bagan 2-1. Tujuan dan Indikator Tujuan



Bagan 2-2. Struktur Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat Badan POM

Dalam rangka mencapai visi misi Badan POM, maka kemudian dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis. Dari tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam uraian Sasaran Strategis Badan POM.

Inspektorat terhubung dengan Sasaran Strategis Badan POM “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM,” melalui Sasaran Program berupa “Meningkatnya pengawasan APIP terhadap pengelolaan sumber daya.” Pada level Eselon II, Sasaran Kegiatan Badan POM diturunkan dalam Sasaran Inspektorat yang keempat berupa “Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien.”

d. Sasaran Strategis

Pengukuran pencapaian sasaran menggunakan indikator - indikator yang disusun secara spesifik, *measurable* - dapat diukur, *achievable* - dapat dicapai, *relevant*, dan *time line* - terdapat batasan waktu untuk mencapainya. Indikator sasaran dan definisi operasional indikator sebagaimana tersaji dibawah ini.

Tabel 2-1. Definisi Operasional Indikator

No.	Sasaran /Indikator	Definisi Operasional Indikator
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1. Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebasdari Kesalahan Material
		2. Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja
2.	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB
3.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"

No.	Sasaran /Indikator	Definisi Operasional Indikator
4.	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	1. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan Nilai Skala 1 s.d. 12 pada komponen proses penguatan pengawasan oleh Tim Asesor PMPRB. Kegiatan penguatan pengawasan meliputi: a) Pengendalian Gratifikasi; b) Penelusuran Pengaduan Masyarakat; c) Pengendalian <i>Whistleblowing System</i> ; d) Penanganan Benturan Kepentingan; e) Pembangunan Zona Integritas; f) Implementasi WBK/WBBM.
	2. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	Dihitung dari kegiatan pengawasan yang dilakukan. Kegiatan pengawasan intern meliputi: a) Audit Operasional; b) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat; c) Evaluasi LAKIP; d) Review Laporan Keuangan; e) Review RKAKL; f) Monev Tindak Lanjut.
	3. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	Data berasal dari persentase laporan hasil PM-EPITE dengan kategori minimal BAIK
5.	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat
6.	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Dihitung dari Hasil Pemeriksaan Semesteran (HAPSEM) BPK RI
7.	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	1. Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"
		2. Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan
8.	Implementasi QMS	Indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi Indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi dibandingkan dengan jumlah indikator pada level 3(dari 93 indikator level 3), dengan level 2 sebagai <i>baseline</i>
9.	Meningkatkan akuntabilitas	Jumlah ASN Inspektorat yang memiliki kinerja dengan kriteria baik dibandingkan dengan seluruh ASN Inspektorat Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan Mempertahankan ISO 9001:2008 Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat

e. Strategi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/*stakeholders* terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan;
2. Bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan;
3. Melibatkan peran aktif manajemen dalam Implementasi SPIP dan pemberdayaan satgas SPIP dan Auditor Internal sebagai bagian dari *three lines of defense*;
4. Melibatkan auditor dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan;
5. Maksimalisasi pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah;
6. Melaksanakan prioritas pengawasan dengan berdasarkan pada *risk-based audit*;
7. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
8. Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk mengembangkan mekanisme pengawasan *by report, by system* dan *by audit*; dan
9. Meningkatkan kompetensi para auditor melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan berkesinambungan.

f. Program






Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Badan POM dirangkum dalam **Program** yaitu:

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan Kegiatan di Inspektorat adalah:

Tabel 2-2. Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan Kegiatan di Inspektorat

	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2019	
KEPALA BPOM 	1. Meningkatkan Jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM				BPOM 
SEKTAMA 	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM	Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM 2. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK 3. Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN			SEKTAMA 
INSP	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan 2. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu 3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM 4. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian interm tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK" 5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat			INSPEKTORAT 

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017

Inspektorat Badan POM telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2017. Selain itu, Inspektorat Badan POM juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Setelah DIPA Inspektorat Badan POM Tahun 2017 disahkan, Inspektorat Badan POM menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2017 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2017 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2017 yang telah disahkan

Tabel 2-3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1.1	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%
		1.2	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	73
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	2.1	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	75%
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	3.1	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%
<i>Internal Process Perspective</i>				
4	Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien	4.1	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10,5
		4.2	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	90%
		4.3	Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	80%
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	5.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	84%
		5.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	76%
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	6.1	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%
<i>Learning and Growth Perspective</i>				
7	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	7.1	Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%
		7.2	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34
8	Implementasi QMS	8.1	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO
9	Meningkatkan akuntabilitas	9.1	Nilai SAKIP Inspektorat	81

D. CARA MENGHITUNG CAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja:

Kurang	• $\chi < 75\%$
Cukup	• $75\% \leq \chi < 100\%$
Baik	• 100%
Memuaskan	• $100\% < \chi \leq 125\%$
Tidak dapat disimpulkan	• $\chi > 125\%$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017, Inspektorat memiliki 9 (sembilan) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Pencapaian kinerja Inspektorat selama tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3-1. Pencapaian Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1. Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%	100%	100,00	Baik
		2. Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	73	70.78	96.96	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	3. Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	75%	88.70%	118.27	Memuaskan
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	4. Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%	84.31%	120.44	Memuaskan
<i>Internal Process Perspective</i>						
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	5. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan ^{*)}	10,5	11.05	105.24	Memuaskan
		6. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu ^{*)}	90%	100%	111.11	Memuaskan
		7. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK" ^{*)}	80%	95.46%	119.32	Memuaskan
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	8. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM ^{*)}	84%	82.82%	98.59	Cukup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
		9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat*)	76%	73.96%	97.32	Cukup
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	10. Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%	97.98%	244.95	Tidak dapat disimpulkan
Learning and Growth Perspective						
7	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	11. Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100,00	Baik
		12. Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	34	100,00	Baik
8	Implementasi QMS	13. Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100,00	Baik
9	Meningkatkan Akuntabilitas	14. Nilai SAKIP Inspektorat	81	74,73	92.26	Cukup

Ket: *) merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2017 dari 14 (empat belas) indikator sasaran strategis, 10 (sepuluh) diantaranya mencapai target, sedangkan 4 (empat) indikator tidak mencapai target.

II. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Penjelasan mengenai masing-masing sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- a) Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan material.
- b) Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja

Tabel 3-2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-1: Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	2017			Realisasi 2017 terhadap 2016 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2017 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%	100%	100%	100,00 (baik)	100	100%	100
	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	69,48	73	70,78	96,96 (cukup)	101,87	81	87,38

Tabel 3-2 diatas menunjukkan bahwa:

- a) Indikator kinerja pertama yaitu “Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material” tahun 2017 terealisasi 100%, bila dibandingkan dengan target tahun 2017 maka capaian indikator adalah sebesar 100% dengan kategori baik. Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 adalah sebesar 100% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 100%. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator tahun 2017 ini adalah:
1. Teknik reviu yang dilakukan oleh Inspektorat baik untuk reviu Laporan Keuangan, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu kepada pedoman reviu yang termutakhir;
 2. Adanya asistensi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai praktik reviu yang baik; dan
 3. Pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Badan POM berupa pendampingan dan pembinaan kepada Balai Besar POM di Makassar, Balai Besar POM di Pekanbaru, dan Balai Besar POM di Bandung dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan unit kerja Balai Besar/Balai POM yang tidak sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
 4. Pelaksanaan kegiatan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Badan POM, hasil dari kegiatan ini berupa laporan hasil reviu RKA-K/L Badan POM tahun anggaran 2017.

5. Pelaksanaan kegiatan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Badan POM, melalui kegiatan Reviu RKBMN diharapkan dapat menekan inefisiensi belanja sebagai akibat pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari kegiatan ini berupa laporan hasil reviu RKBMN Badan POM Tahun Anggaran 2019.
6. Penguatan peran Tim Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa.
7. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

Pencapaian indikator kinerja “Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material” perlu terus dipertahankan dengan cara terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPKP, terutama dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu sehingga kredibilitas Badan POM dapat terus terjaga.

- b) Realisasi indikator kinerja kedua yaitu “Rata-rata nilai SAKIP Unit Kerja” pada tahun 2017 sebesar 70,78, bila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 73 maka capaian adalah sebesar 96,36% dengan kategori cukup. Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 adalah sebesar 101,87% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 87,38%, sehingga masih terdapat *gap* dengan RPJMN untuk indikator tersebut sebesar 10,22. Diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja Badan POM.

Pada tahun 2017, realisasi indikator kinerja “Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP unit kerja” tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa kekurangan pada penerapan SAKIP di lingkungan Badan POM, antara lain sebagai berikut:

- 1) Target kinerja di dalam Renstra maupun dalam perencanaan kinerja tahunan belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan basis data yang akurat dan memadai;
- 2) Rencana kinerja tahunan belum digunakan secara memadai untuk penyusunan rencana anggaran.

- 3) IKU untuk sebagian unit kerja masih belum cukup untuk merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai atau untuk menyimpulkan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.
- 4) IKU telah direviu secara berkala, namun hasil reviu belum sepenuhnya dimanfaatkan dan digunakan untuk perbaikan
- 5) Sistem pengukuran kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Perhitungan realisasi dan capaian kinerja masih dilakukan secara manual sehingga belum dapat menjamin validitas data kinerja.
- 6) Pelaksanaan *reward and punishment* bagi individu pegawai masih hanya didasarkan pada tingkat kehadiran pegawai, belum dikembangkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja riil setiap pegawai.
- 7) Laporan kinerja yang disusun masih terbatas pada pemenuhan kewajiban formal, sebagai media untuk penyampaian capaian sasaran, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi.
- 8) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti secara memadai untuk perbaikan perencanaan kinerja maupun untuk peningkatan kinerja organisasi.
- 9) Laporan Kinerja masih lebih banyak menjelaskan realisasi anggaran per output kegiatan, belum secara spesifik menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi (*Cost per Outcome*).
- 10) Hasil evaluasi internal terhadap pencapaian target kinerja belum didokumentasikan secara memadai dan belum disampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan
- 11) Evaluasi internal yang telah dilaksanakan belum mencakup analisis dan simpulan tentang perubahan antara kondisi sebelum
- 12) Pelaksanaan evaluasi internal belum diarahkan pada penilaian mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran unit kerja.
- 13) Evaluasi internal belum menghasilkan alternatif perbaikan atau peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan oleh unit kerja.

Inspektorat melaksanakan evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah terhadap 55 unit eselon II/Unit Mandiri, yaitu evaluasi dan penilaian akan

kewajaran bentuk pelaporan, penyajian dan kebenaran data LAKIP Eselon II (penilaian secara horizontal), disamping itu evaluasi tersebut juga melihat keselarasan pencapaian Renstra Eselon II bersangkutan dengan Renstra/*Grand Strategy* Badan POM (penilaian secara vertikal).

Adapun rincian nilai SAKIP (lampiran 13) dari 55 unit kerja, 45 unit kerja memperoleh nilai BB, 8 unit kerja memperoleh nilai B, dan 4 unit kerja memperoleh nilai CC. Belum ada unit kerja yang meraih nilai SAKIP dengan predikat “Memuaskan” (nilai A).

Dalam rangka meningkatkan kualitas SAKIP dan upaya pencapaian target kinerja tersebut, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat BPOM antara lain:

- 1) Inspektorat dan beberapa perwakilan Unit Kerja melaksanakan *benchmarking* ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah berhasil memperoleh hasil evaluasi dengan predikat ‘A’ (Memuaskan) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dipilih karena berhasil mengefisienkan program kerja yang jelas, terukur dan bermanfaat untuk masyarakat dengan tetap berorientasi hasil (asas *money follow result*) dan seluruh program tetap berjalan.
- 2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka *desk evaluation* dan verifikasi faktual atas data yang disajikan pada LAKIP unit kerja yaitu pada BBPOM di Manado, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Bandung, dan BPOM di Batam.

Penguatan implementasi SAKIP Badan POM harus terus dilaksanakan di antaranya dengan bekerja sama dengan instansi pembina yakni Kementerian PAN dan RB supaya terdapat unit kerja yang mendapat predikat ‘memuaskan’. Penguatan dan perbaikan dalam implementasi sistem akuntabilitas tersebut terdiri atas lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

2. Meningkatnya Efektivitas Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi (RB)

Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM dan memastikan pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan yang dituangkan dalam *roadmap*, Badan POM telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.07.17.2986 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan POM. Inspektur Badan POM berperan sebagai Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) RB.

Tim Monev RB bertugas untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Tim Pelaksana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monev dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya.

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah “Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map Reformasi Birokrasi” dengan target untuk tahun 2017 adalah sebesar 75%.

**Tabel 3-3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-2:
Meningkatnya Efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	2017			Realisasi 2017 terhadap realisasi 2016 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2017 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	69,68 %	75%	88,70%	118,27%	127,30%	80%	110,88%

Tabel 3-3 diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi indikator kinerja “Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB” realisasi tahun 2017 adalah 88,70%, bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2017 capaian indikator adalah sebesar 118,27% dengan kategori memuaskan. Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 adalah sebesar 127,30% dan bila dibandingkan dengan

RPJMN tahun 2019 adalah 110,88% sehingga target jangka menengah telah tercapai.

Komitmen dari masing-masing unit kerja untuk melaksanakan roadmap Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sudah kuat. Berdasarkan hasil monitoring pencapaian *roadmap* RB, sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dalam *roadmap* RB telah terealisasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan *roadmap* pada area perubahan sebagai berikut:

Area Perubahan	Kendala
Mental Aparatur	Masih belum terlaksananya pelatihan gugus tugas revolusi mental
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Review Renstra BPOM/Renstra Unit Kerja belum mengakomodir perubahan dari capaian tahun n-1 2. Perlu adanya beberapa perubahan data yang harus disesuaikan dengan perubahan struktur BPOM sehingga evaluasi terhadap aplikasi <i>e- performance</i> belum dapat dilaksanakan
Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi e-payment dengan PPUB masih terkendala dengan kesiapan sistem 2. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik masih secara ad-hoc
SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan aplikasi yang terintegrasi untuk menyandingkan hasil perhitungan ABK dengan bazetting pegawai secara otomatis dalam peta jabatan 2. Perlu penyesuaian kebutuhan pegawai sesuai dengan rencana struktur organisasi yang baru.
Peraturan Perundang-undangan	Dalam proses pembuatan kebijakan, seringkali terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dengan pelaku usaha, sehingga diperlukan waktu pembahasan yang lebih lama.
Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem <i>rewards</i> dan <i>punishment</i> dalam lingkup pelayanan di Badan POM secara keseluruhan belum disusun. 2. Belum ada layann pengaduan via sms, ataupun whatsapp dan twitter

3. Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan

Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan sasaran ini adalah 'Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "Baik", yang merupakan kumulatif dari penilaian terdiri atas 12 aspek terkait kompetensi auditor, 3 aspek terkait etika dan perilaku, serta 2 aspek terkait rekomendasi audit.

Berdasarkan hasil rekap survei kepuasan pelanggan internal terhadap auditor (pelanggan internal dalam hal ini adalah auditan), nilai rata-rata yang diperoleh adalah 84,31%. Adapun hasil penilaian Survei Kepuasan Pelanggan Internal terdapat pada Lampiran 11.

**Tabel 3-4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-3:
Meningkatnya Kepuasan Pemangku Kepentingan**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	2017			Realisasi 2017 terhadap realisasi 2016 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2017 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	72,04%	70%	84,31%	120,44% (Memuaskan)	117,03	80%	105,39

Tabel 3-4 diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja 'Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "Baik" tahun 2017 adalah 84,31%, bila dibandingkan dengan target tahun 2017 maka capaian indikator adalah sebesar 120,44% dengan kategori memuaskan. Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 adalah sebesar 117,03% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 105,39% sehingga target jangka menengah telah tercapai serta sudah tidak terdapat *gap* hal ini menunjukkan usaha peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dan meningkatkan kinerja Inspektorat.

Realisasi pada tahun 2017 telah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa *stakeholder* semakin puas dengan kinerja Inspektorat.

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator ini adalah peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan auditor, baik melalui diklat pembentukan/penjenjangan auditor maupun diklat substantif.

4. Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien

Sasaran strategis ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan.

Pada tahun 2017 Badan POM melaksanakan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) periode tahun 2016 dan

semester I Tahun 2017. Kegiatan PMPRB ini dilaksanakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*) oleh asesor Badan POM terhadap 8 (delapan) area perubahan. Sebagai salah satu area perubahan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat, bidang penguatan pengawasan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Badan POM. Bidang penguatan pengawasan meliputi 7 hal, yaitu: 1) Pengendalian Gratifikasi, 2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 3) Penelusuran Pengaduan Masyarakat, 4) *Whistleblowing system*, 5) Penanganan Benturan Kepentingan, 6) Pembangunan Zona Integritas, dan 7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2) Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu
Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan pada kegiatan pengawasan yang terdiri dari Audit Operasional, Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Evaluasi LAKIP, Reviu Laporan Keuangan Badan POM, dan Laporan Monev Tindak Lanjut Temuan Inspektorat.

3) Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria minimal “Baik”

Pada tahun 2015, Inspektorat mulai mengembangkan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE), yang merupakan instrumen untuk menilai tingkat keandalan SPIP di tingkat entitas. Nilai tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan nilai akhir yang menggambarkan tingkat keandalan SPIP tingkat Badan POM.

Pengembangan tersebut yaitu PM-EPITE *online* berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis web untuk kemudahan pelaksanaan evaluasi pengendalian internal di lingkungan Badan POM. Namun, pada tahun 2017, belum seluruh unit kerja melakukan pengisian ke dalam aplikasi PM-EPITE *online* sehingga masih ada pelaporan secara manual.

Dari hasil evaluasi terhadap PM-EPITE ini akan diperoleh kesimpulan mengenai keandalan pengendalian intern tingkat entitas, temuan, dan rekomendasi untuk perbaikan dan selanjutnya dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yaitu tingkat keandalan rendah (nilai akhir 0% s.d. 50%), tingkat keandalan sedang (nilai akhir 51% s.d. 80%), dan tingkat keandalan tinggi (nilai akhir 81% s.d. 100%).

**Tabel 3-5. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4:
Meningkatnya Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	2017			Realisasi 2017 terhadap realisasi 2016 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2017 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10,46	10,5	11,05	105,24 (memuaskan)	105,64	11	100,45
	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	106,45%	90%	100%	111,11 (memuaskan)	93,94	90%	111,11
	Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	90,85%	80%	95,46%	119,32 (memuaskan)	105,07	94,50%	101,02

Tabel 3-5 di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Realisasi indikator kinerja "Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan" tahun 2017 adalah 11,05, bila dibandingkan dengan target tahun 2017 maka capaian indikator sebesar 105,24% (kategori memuaskan). Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 adalah sebesar 105,64% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 100,45%.

Secara rinci kenaikan nilai PMPRB bidang penguatan pengawasan untuk setiap komponennya dapat dilihat pada tabel berikut:

Komponen Penilaian	Nilai maksimal	Nilai Hasil PMPRB		Kenaikan/ Penurunan Hasil <i>Self Assesment</i>
		Tahun 2016	Tahun 2017	
Pengendalian Gratifikasi	1,50	1,50	1,50	-
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1,50	1,34	1,42	↑ 0,8
Penelusuran Pengaduan Masyarakat	2,00	2,00	2,00	-
<i>Whistleblowing system</i>	1,50	1,50	1,50	-
Penanganan Benturan Kepentingan	1,50	1,25	1,50	↑ 0,25
Pembangunan Zona Integritas	2,50	1,75	2,00	↑ 0,25
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1,50	1,13	1,13	-
Nilai Total	12,00	10,46	11,05	↑ 0,59

Dari tabel di atas dapat terlihat kenaikan penilaian pada komponen:

a) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Nilai SPIP mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen resiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.04.01.1.23.08.17.3896 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Resiko di Lingkungan Badan POM.

b) Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai Penanganan Benturan Kepentingan mengalami kenaikan seiring dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM dan telah dibangunnya aplikasi pelaporan benturan kepentingan secara *online*. Selain itu, telah dilakukan monitoring secara berkala terhadap kebijakan Kepala Badan POM terkait benturan kepentingan, yakni Instruksi Kepala Badan POM Nomor HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal 9 September 2016 tentang Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM dengan hasil sebagai berikut:

- Jumlah PNS yang bekerja di sarana 838 orang dan sampai saat ini yang sudah menyampaikan bukti pengunduran diri rangkap jabatan 833 orang (99,40%).
- Masih terdapat 5 orang yang belum menyampaikan bukti pengunduran diri rangkap jabatan yaitu 4 orang Pejabat

Fungsional dan 1 orang pejabat struktural eselon IV di Balai Besar/Balai POM.

- Jumlah PNS yang memiliki sarana apotek adalah sebanyak 50 PNS. Sebanyak 49 PNS telah menyampaikan bukti pengalihan kepemilikan apotek kepada Inspektorat dan 1 orang PNS masih belum mengalihkan kepemilikan apoteknya.

c) Pembangunan Zona Integritas

Pada tahun 2017 Badan POM telah mengusulkan 4 (empat) unit kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Balai Besar POM di Surabaya, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT, dan Pusat Informasi Obat dan Makanan. Hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2017, semua unit kerja yang diusulkan **memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi**.

- 2) Realisasi indikator kinerja “Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu” tahun 2017 adalah 90%, bila dibandingkan dengan target tahun 2017 maka capaian indikator adalah sebesar 100% (kategori memuaskan). Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 adalah sebesar 105,64% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 100,45%.

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator ini adalah adanya komitmen internal Inspektorat dalam pemenuhan penyelesaian laporan hasil pengawasan dan kerja sama dari berbagai pihak (unit kerja Badan POM maupun instansi terkait lainnya) sehingga penyusunan laporan dapat dilakukan dengan lancar dan terselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Rincian laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu tahun 2017 adalah:

- a) Kegiatan Audit Keuangan dilaksanakan di 27 Satuan Kerja/Unit Kerja. Dari seluruh audit keuangan yang telah dilaksanakan tahun 2017 sebanyak 27 Laporan Hasil Audit selesai disusun tepat waktu.

- b) Kegiatan Audit Kinerja dilaksanakan di 20 Satuan Kerja/Unit Kerja. Dari seluruh audit keuangan yang telah dilaksanakan tahun 2017 sebanyak 27 Laporan Hasil Audit Kinerja selesai disusun tepat waktu.
- c) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (survei IKM) bertujuan untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat terhadap mutu layanan yang diberikan oleh unit layanan Badan POM. Pada tahun anggaran 2017 Inspektorat telah berhasil melaksanakan survei IKM di 12 unit pelayanan publik Badan POM. Sebagai *output* dari kegiatan ini, Inspektorat telah menyusun laporan survei IKM. Hasil survei IKM dapat dilihat pada **Lampiran 14**.
- d) Reviu atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2016 telah dilaksanakan pada bulan Februari 2017 dan Reviu Laporan Keuangan Badan POM Semester I Tahun 2017 pada bulan Juli 2017 dengan *output* berupa Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektur.
- e) Reviu atas Rencana Kebutuhan BMN Badan POM TA 2019 telah dilaksanakan pada bulan September dan Oktober tahun 2017 dengan *output* berupa Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektur.
- f) Reviu RKA-K/L TA 2018 telah dilaksanakan oleh APIP bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli dan September 2017 serta diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen dan Petugas Perencana dari 41 Satker di lingkungan Badan POM yang bertanggungjawab dalam menyusun RKA-K/L Satker. *Output* dari kegiatan tersebut telah disusun 2 (dua) laporan.
- g) Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Segala bentuk rekomendasi hasil pengawasan dari aparat pengawas intern adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Badan POM. Untuk itu, sangat penting bagi Inspektorat untuk melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan tindak lanjut temuan. Inspektorat menyusun laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut

Inspektorat setiap triwulan. Realisasi laporan yang disusun tepat waktu sebanyak 4 (empat) laporan. Hasil Monitoring Status Temuan Audit Inspektorat Badan POM Tahun Audit s.d. Tahun 2017 Per 31 Des 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

- 3) Realisasi indikator kinerja 'Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"' tahun 2017 adalah 95,46%, bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2017 maka capaian indikator adalah sebesar 119,32% (kategori memuaskan). Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 adalah sebesar 105,07% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah sebesar 101,02%.

Faktor-faktor penyebab tingginya hasil capaian tersebut dikarenakan:

- a) satgas SPIP selaku personil yang melaksanakan penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern di unit kerja (*self assessment*) belum dapat melaksanakan penilaian secara independen dan objektif sehingga hampir seluruh poin penilaian mendapatkan nilai baik.
- b) Belum dilaksanakannya verifikasi atas hasil pengisian PM-EPITE dan belum adanya kriteria verifikasi untuk evaluasi hasil penilaian mandiri PM-EPITE.

Hasil penilaian PM-EPITE terdapat pada **Lampiran 12**.

5. Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, terdapat dua indikator kinerja yang ditetapkan yaitu:

- 1) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM dengan target sebesar 84%. Indikator ini dihitung dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) yang telah ditindaklanjuti oleh Badan POM dibandingkan total rekomendasi.
- 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat dengan target sebesar 76%.

**Tabel 3-6. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5:
Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	2017			Realisasi 2017 terhadap 2016 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2017 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	100%	84%	82,82%	98,59 (cukup)	82,82	88%	94,11
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	88,99%	76%	73,96%	97,32 (cukup)	83,11	82%	90,19

Tabel 3-6 diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Realisasi indikator kinerja “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM” tahun 2017 adalah 82,82%, bila dibandingkan dengan target tahun 2017 maka capaian indikator adalah sebesar 98,59% (kategori cukup). Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 adalah sebesar 82,82% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 94,11%.

Penurunan realisasi 2017 bila dibandingkan dengan capaian 2016 dikarenakan untuk temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM tahun 2016 sebagian besar belum ditindaklanjuti oleh satker/unit terkait.

Untuk meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, Inspektorat telah melakukan:

- a. menyampaikan surat tertulis kepada masing-masing unit untuk segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK;
- b. melakukan koordinasi dengan BPK.

- 2) Realisasi indikator kinerja “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat” tahun 2017 adalah 73,96%, bila dibandingkan dengan target tahun 2017 maka capaian indikator adalah sebesar 97,32% (kategori cukup). Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan realisasi

tahun 2016 adalah sebesar 83,11% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 90,19%. Rekapitulasi monitoring rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang telah ditindaklanjuti dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Penurunan realisasi 2017 bila dibandingkan dengan capaian 2016 dikarenakan pelaksanaan audit Inspektorat Badan POM untuk tahun 2017 sebagian besar dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran, sehingga sebagian besar rekomendasi hasil audit belum ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait.

Keberhasilan pencapaian target kedua indikator tersebut dikarenakan pelaksanaan monitoring terhadap tindak Lanjut temuan telah dilakukan secara lebih intensif, antara lain dengan memberikan surat peringatan/teguran secara rutin kepada unit kerja terkait temuan yang belum ditindaklanjuti atau mengomunikasikan secara langsung kepada unit kerja terkait pada saat pelaksanaan kegiatan yang melibatkan unit kerja.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yaitu:

- a) Pemantauan/evaluasi TL atas laporan hasil audit (hasil proses pemeriksaan BPK/Inspektorat)
Pemantauan/evaluasi TL atas laporan hasil audit (hasil proses pemeriksaan BPK/Inspektorat) dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi progress tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan kerja/unit pelaksana, evaluasi dilaksanakan dalam bentuk menegaskan kembali apakah rekomendasi yang diberikan sudah ditindaklanjuti atau belum
- b) Rapat Evaluasi dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
Dalam hal pemantauan TGR ini dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan POM yang terdiri atas perwakilan dari Inspektorat, Biro Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

- c) Disusunnya Keputusan Kepala Badan POM no HK.04.01.1.23.09.17.4255 tahun 2017 tentang Mekanisme Penyelesaian Rekomendasi Hasil Audit yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- d) *Focus Group Discussion* (FGD) Badan POM bersama *stakeholder*
FGD bertujuan untuk penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan, sosialisasi Instruksi Presiden No 3 tahun 2017 yang mengatur tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan, dan meningkatkan dukungan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan Badan POM/Balai/Balai Besar POM.
Pada tahun 2017 FGD dilaksanakan sebanyak 3 kali di Denpasar, Batam dan Manado dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Komitmen Pemerintah Daerah untuk bersama-sama dengan Badan POM melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai yang diamanatkan pada Inpres No 3 tahun 2017.
 - 2) Akan dibuat pedoman pengawasan obat dan makanan antara lain:
 - Pedoman efektifitas pengawasan obat dan makanan.
 - Pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan.
 - Pedoman sosialisasi dan bimtek .
 - Pedoman monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan.
 - 3) Badan POM berharap mendapatkan dukungan dari BPK RI dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang tidak eksplisit tercantum pada konsep RPJMN 2020 mendatang.
 - 4) Badan POM akan melakukan *regulatory assistance* kepada Pemerintah Daerah seperti bimbingan teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB).
- e) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Badan POM meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu Laporan Keuangan & RKA-K/L, evaluasi AKIP, dan kegiatan pengawasan

lainnya. Untuk itu, laporan hasil pengawasan disusun untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, akan diperoleh gambaran mengenai areas of improvement dari masing-masing APIP.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini terdapat indikator Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi dengan target 40%.

**Tabel 3-7. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-6:
Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	2017			Realisasi 2017 terhadap 2016 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2017 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	44,09%	40%	97,98%	244,95	222,23	100%	97,98

Tabel 3-7 diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja “Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi” tahun 2017 adalah 97,98% bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2017 capaian indikator adalah sebesar 244,95% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 adalah

sebesar 222,23% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 97,98%.

Naiknya realisasi 2017 bila dibandingkan dengan capaian 2016 yang mencapai angka 222,23% dikarenakan hasil capaian evaluasi IACM untuk level 3 yang ditargetkan dicapai pada tahun 2019 berhasil dicapai oleh Inspektorat Badan POM pada tahun 2017.

Keberhasilan pencapaian target pada sasaran ini utamanya dikarenakan:

1. Dukungan dari pimpinan Badan POM terhadap peran Inspektorat sebagai APIP serta komitmen dari Inspektur dan seluruh pegawai di Inspektorat untuk senantiasa mengembangkan diri dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan sesuai dengan tuntutan organisasi.
2. Dikembangkannya berbagai aplikasi pendukung untuk mendukung kegiatan pengawasan Inspektorat antara lain aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Audit (SIMKA), aplikasi PM-EPITE, aplikasi Pelaporan Manajemen Resiko, aplikasi Pelaporan Gratifikasi, aplikasi *Whistle blowing System* (WBS), aplikasi Pelaporan Benturan Kepentingan secara *online* dengan basis data secara *web base*.
3. Integrasi ISO 9001:2015 dengan Sistem Penegendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimana pembentukan satgas SPIP dan Auditor Internal mengacu kepada *best practices* konsep *three lines of defense* pada organisasi modern untuk meningkatkan pengendalian organisasi. Konsep pengendalian organisasi melalui 3 (tiga) lapis pertahanan terdiri dari:
 - Lini pertama merupakan tanggung jawab manajemen operasional untuk menjalankan kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus dalam seluruh tahapan kegiatan. Manajemen dibantu Satgas SPIP dan seluruh pegawai diharapkan mampu untuk memainkan peran pertama dalam konsep *three lines of defense*;
 - Lini kedua yaitu Auditor Internal dibentuk untuk membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan; dan

- Lini ketiga adalah auditor (APIP) sekaligus sebagai Koordinator Auditor Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian intern.

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah RPJMN 2019 yang memiliki target capaian IACM level 3, maka Inspektorat masih harus melakukan perbaikan sesuai dengan usulan perbaikan hasil evaluasi BPKP tahun 2017 yaitu pada elemen 6 yang mengharuskan Inspektorat Badan POM untuk memiliki satgas/komite audit yang bertugas melakukan pengawasan/reviu kegiatan pengawasan APIP.

7. Meningkatkan pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

- 1) Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kriteria baik dengan target 100%.
- 2) Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dengan target 34 orang.

**Tabel 3-8. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-7:
Meningkatkan pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	2017			Realisasi 2017 terhadap 2016 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2017 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100%	100,00 (baik)	100	100%	100
	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	34	34	100,00 (baik)	100	34	100

Tabel 3-8 diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Realisasi indikator kinerja 'Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"' tahun 2017 adalah 100%, bila dibandingkan dengan target tahun 2017 maka capaian indikator adalah sebesar 100% (kategori baik). Realisasi indikator tahun 2017 bila

dibandingkan dengan capaian tahun 2016 adalah sebesar 100% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 100%.

Pada tahun 2017 Inspektorat berhasil mempertahankan capaian SDM Aparatur BPOM yang memiliki kriteria baik sebesar 100% dan berkomitmen agar capaian tersebut dapat konsisten terpenuhi sebesar 100% sesuai dengan target pada Renstra tahun 2019.

Keberhasilan pencapaian target indikator tersebut dikarenakan adanya konsistensi dan keterlibatan seluruh pegawai Inspektorat untuk mempertahankan capaian tahun ini dan pegawai Inspektorat telah melaksanakan tugasnya sesuai target yang diperjanjikan dalam SKP.

- 2) Realisasi indikator kinerja “Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan” tahun 2017 adalah sebanyak 34 orang, bila dibandingkan dengan target tahun 2017 maka capaian indikator adalah sebesar 100% (kategori baik). Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 adalah sebesar 100% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 100%.

Bila dibandingkan dengan target tahun 2016, capaian target jumlah SDM yang mengikuti pelatihan tahun 2017 adalah 34 orang, tidak terjadi peningkatan target sejak tahun 2016. Hal ini karena pada tahun 2017 tidak terdapat penambahan pegawai di Inspektorat badan POM. Target ini sesuai dengan target jangka menengah tahun 2019 yaitu 34 orang dengan asumsi tidak terdapat penambahan pegawai inspektorat untuk tahun-tahun berikutnya sehingga seluruh pegawai Inspektorat telah mengikuti pelatihan. Rekapitulasi pelatihan pegawai Inspektorat tahun 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Keberhasilan pencapaian target indikator tersebut dikarenakan komitmen pimpinan untuk selalu menjaga kompetensi pegawainya melalui pelatihan yang terstruktur seperti:

- a) Pelatihan di kantor sendiri (PKS);
- b) Pelatihan sertifikasi Auditor;
- c) Pelatihan/Workshop Internal Audit;

- d) Peningkatan kompetensi SDM penunjang pengawasan;
- e) Pembinaan administrasi kepegawaian;
- f) Pertemuan *learning organization*;
- g) Peningkatan kompetensi pengawasan *intern*.

Selain pelatihan-pelatihan di atas, beberapa pegawai di Inspektorat juga telah mengikuti pelatihan bersertifikasi internasional, antara lain:

- a) Sertifikasi QIA 1 orang;
- b) Sertifikasi CFRA 2 orang;
- c) Sertifikasi CRMO 4 orang;
- d) Sertifikasi CRMP 4 orang;
- e) Sertifikasi CIA 1 orang ;
- f) Sertifikasi CFE 2 orang.

8. Implementasi *Quality Management System* (QMS)

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah sertifikasi ISO 9001.

Tabel 3-9. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke- 8: Implementasi QMS

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	2017			Realisasi 2017 terhadap 2016 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2017 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100,00 (baik)	100,00	Sertifikasi ISO	100,00

Tabel 3-9 diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja “Perolehan sertifikasi ISO 9001” tahun 2017 adalah diperolehnya Sertifikat ISO 9001:2015, bila dibandingkan dengan target tahun 2017 maka capaian indikator adalah sebesar 100% (kategori baik). Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 adalah sebesar 100% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 100%.

Dari awal mula sertifikasi ISO 9001 dilakukan di lingkungan Badan POM, Inspektorat selalu dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001. Hal ini tentu saja tidak lepas dari partisipasi seluruh pegawai dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu di Inspektorat serta selalu berusaha untuk menjaga konsistensi dan melakukan perbaikan yang

berkesinambungan (*continuous improvement*) dalam implementasi *Quality Management System* ISO 9001. Namun demikian tetap dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk dapat mempertahankan capaian hingga tahun 2019.

Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini telah dilaksanakan kegiatan pendukung sebagai berikut:

1) Audit internal QMS ISO 9001:2015

Audit internal bertujuan untuk meyakinkan manajemen bahwa Standar Operasional baku telah dijalankan dengan benar dan bertujuan pula untuk membantu manajemen agar mampu meningkatkan kinerja organisasi melalui serangkaian saran perbaikan. Audit internal QMS ISO 9001:2015 telah terlaksana pada bulan Agustus 2017 pada seluruh unit kerja di Badan POM termasuk Inspektorat.

2) Rapat Tinjauan Manajemen

Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektifitasnya terus berlanjut, maka manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi pada selang waktu terencana Hal ini dilakukan dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup adanya keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya, peningkatan dari produk yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan dan kebutuhan sumber daya. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Manajemen Puncak dan anggota Manajemen Representatif di lingkungan Badan POM.

3) Audit *Surveillance* QMS ISO 9001:2015

Audit *surveillance* bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuannya dan meyakini bahwa SOP telah dilaksanakan dengan benar. Pada tahun 2017 Badan POM berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh auditor eksternal dari PT TUV SUD Indonesia.

4) Workshop Internal Audit QMS Badan POM Terintegrasi

Sejak diterbitkannya ISO 9001:2015 Badan POM berkomitmen untuk mempertahankan Sertifikat ISO 9001. Badan POM juga melakukan integrasi antara ISO 9001:2015 dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rangka internalisasi dan penyamaan persepsi terkait integrasi ISO 9001:2015 dengan SPIP dilaksanakan workshop di Jayapura dan Bogor yang dihadiri oleh perwakilan Auditor Internal dan Manajemen Representatif dari seluruh Unit Kerja di Badan POM.

9. Meningkatkan Akuntabilitas

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah 'Nilai SAKIP Inspektorat' dengan target nilai 81. Nilai SAKIP Inspektorat yang dimaksud adalah hasil evaluasi SAKIP Inspektorat.

Tabel 3-10. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke- 9: Meningkatkan Akuntabilitas

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	2017			Realisasi 2017 terhadap 2016 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2017 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	72,06	81	74,73	92,26 (cukup)	103,71	81	92,25

Tabel 3-10 diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja "Nilai SAKIP Inspektorat" tahun 2017 adalah sebesar 74,73, bila dibandingkan dengan target tahun 2017, maka capaian indikator adalah sebesar 92,26% (kategori cukup). Realisasi indikator tahun 2017 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 adalah sebesar 103,71% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 92,25%.

Nilai SAKIP Inspektorat tahun 2017 mengalami peningkatan bila dibandingkan capaian tahun 2016 yaitu sebesar 2,67 poin. Namun demikian bila dibandingkan dengan target tahun 2017, maka realisasi target belum tercapai.

Kendala pencapaian target tahun 2017 ini disebabkan oleh adanya beberapa kelemahan dalam implementasi SAKIP Inspektorat antara lain:

- a) Kelemahan dalam reuiu dokumen terkait akuntabilitas kinerja secara berkala dan
- b) Masih rendahnya pemanfaatan evaluasi internal dalam perbaikan organisasi.

- c) Belum adanya pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date* dan pedoman atau SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.

Realisasi nilai SAKIP Inspektorat dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan tren data tersebut maka target tahun 2019 optimis dapat tercapai dengan melakukan perbaikan dalam penyusunan LAKIP serta implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini maka dilaksanakan kegiatan pendukung sebagai berikut:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan kinerja, antara lain dokumen Renstra 2015 - 2019, dokumen Indikator Kinerja Utama, dan dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen perencanaan kinerja ini menjadi acuan bagi Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat sehingga mendukung pencapaian tujuan Badan POM.
- b) Pelaksanaan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja Inspektorat sesuai dengan perkembangan terkini.
- c) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Inspektorat sebagai salah satu bagian dari sebuah instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya yang dituangkan dalam sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Inspektorat adalah salah satu wujud kegiatan dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Badan diharapkan dapat mencerminkan kinerja Inspektorat dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET 2019

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja Inspektorat Badan POM pada tahun 2015, 2016 dan 2017 bila dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada Renstra tahun 2019 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3-11. Perbandingan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2017 terhadap Target Renstra 2019

No.	Sasaran	Indikator	Target Renstra 2019	2015		2016		2017	
				Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	81	NA (indikator berbeda)	--	69,94	86,35%	70,78	87,38%
2.	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	80%	69,12%	86,40%	69,68%	87,10%	88,70%	110,88%
3.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	80%	68,36%	85,45%	72,04%	90,05%	84,31%	105,39%
4.	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	11	10,67	97%	10,46	95,09%	11,05	100,45%
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	90%	85,37%	94,86%	106,45%	118,28%	100%	111,11%
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	94,50%	90,40%	95,66%	100%	105,82%	95%	100,53
5.	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	88%	81,38%	92,48%	100%	113,64%	83%	94,32%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	82%	53,64%	65,41%	88,99%	108,52%	73,96%	90,20%
6.	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen	Persentase indikator pada level 3 skema	100%	2%	2%	44,09%	44,09%	97,98%	97,98%

No.	Sasaran	Indikator	Target Renstra 2019	2015		2016		2017	
				Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)
	Pengawasan Intern	IACM yang dipenuhi							
7.	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	29	85,29%	34	100%	34	100%
8.	Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100%	Sertifikasi ISO	100%	Sertifikasi ISO	100%
9.	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	81	B	--	72,06	88,96	74,73	92,26

Dari tabel di atas diketahui bahwa beberapa realisasi indikator telah mencapai target Renstra tahun 2019 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2018 dan 2019 untuk indikator pada sasaran "Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana, dan RB" dan "Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien" dengan memperhatikan *baseline* data hasil capaian indikator tahun 2017.

C. REALISASI ANGGARAN

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Badan POM selama tahun 2017 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Badan POM dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Inspektorat tahun 2017 untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 81,32% dari jumlah keseluruhan pagu (Rp11.614.664.000,00) atau 92,29% dari jumlah keseluruhan anggaran setelah dilakukan *self-blocking* (Rp10.234.949.00). Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-12. Anggaran Inspektorat Sebelum *Self-Blocking*

Target		Realisasi		Persentase (%)	
Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
62	11.614.664.000	54	9.445.417.238	87,10%	81,32

Tabel 3-13. Anggaran Inspektorat Setelah *Self-Blocking*

Target		Realisasi		Persentase (%)	
Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
55	10.234.949.000	54	9.445.417.238	98,18	92,29

Tabel 3-14. Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2017

No.	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	13	13	100	209.888.000	205.388.250	97,86
2.	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana, dan RB	9	11	122,22	290.549.000	240.506.557	82,78
3.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan						
4.	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	179	194	108,38	3.754.677.000	3.548.991.976	94,52
5.	Meningkatkan tindaklanjut hasil pengawasan	15	16	106,67	1.597.550.000	1.409.992.375	88,26
6.	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern						
7.	Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management	78	78	100	3.706.149.000	3.414.581.652	92,13
8.	Implementasi QMS	9	9	100	660.556.000	610.655.653	92,45
9.	Meningkatkan akuntabilitas	2	2	100	15.580.000	15.300.775	98,21
Jumlah total		305	323	105,90	10.234.949.000	9.445.417.238	92,29

Realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D. Analisis Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan Inspektorat, diperoleh informasi sebagai berikut:

Kategori Efisiensi	Jumlah Kegiatan
Ekstrem Efisien (TE > 0,5)	7
Efisien	48
Tidak Terealisasi	7

- a. Terdapat beberapa kegiatan dengan indeks efisiensi di atas 1,50 sehingga memiliki tingkat efisiensi lebih dari 0,5 antara lain:
- Intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM (TE = 0,53)
 - Pembahasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan Intern (TE = 1,08)
 - Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulanan (TE = 0,71)
 - Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (TE = 1,35)
 - Pelatihan di Kantor Sendiri (TE = 0,53)
 - Rapat persiapan audit internal (TE=3,45)
 - Penilaian risiko (TE = 0,86)

Tingkat efisiensi yang tinggi ini disebabkan penganggaran komponen belum memperhatikan tingkat prioritas/urgensi dalam mencapai output yang ditargetkan.

- b. Sebanyak 48 kegiatan yang telah terealisasi dinyatakan efisien.
- c. Terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tidak terealisasi yaitu :
- Probity audit (kegiatan prioritas yang terkait MDG'S/*new initiative*) → pemotongan
 - Monitoring dan evaluasi (MONEV) pelaksanaan program reformasi birokrasi BPOM
 - Pelatihan Assessor PMPRB
 - Penyusunan Majalah Infowas
 - Tinjauan Manajemen Unit Kerja Inspektorat
 - Pemantauan SPIP Satker/Unit Mandiri

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak terealisasi karena terdapat pemotongan dan revisi anggaran pada unit Inspektorat. Sedangkan kegiatan Evaluasi Kinerja Badan POM tidak terealisasi karena evaluasi kinerja bagi seluruh struktural tingkat Badan POM tidak dilaksanakan dan sudah dilaksanakan evaluasi kinerja pada Kesektamaan dan pada unit Inspektorat sendiri.

Selain itu untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran, juga dilakukan perhitungan terhadap efisiensi per sasaran sebagai berikut:

Tabel 3-15. Efisiensi Per Sasaran terhadap Anggaran Setelah *Self-Blocking*

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	97,86	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana, dan RB	82,78	122,22	1,48	1,00	0,48	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan						
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	94,52	108,38	1,15	1,00	0,15	Efisien
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	88,26	106,67	1,21	1,00	0,21	Efisien
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern						
7	Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management	92,13	100,00	1,09	1,00	0,09	Efisien
8	Implementasi QMS	92,45	100,00	1,08	1,00	0,08	Efisien
9	Meningkatkan akuntabilitas	98,21	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2017 adalah tahun ketiga dalam implementasi Rencana Strategis 2015-2019 Inspektorat. Pengawasan fungsional yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kapabilitas dan keahliannya.

Pada tahun 2017, terdapat beberapa keberhasilan besar Inspektorat Badan POM dan diakui oleh mitra kerja, antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2016;
- b. Peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016 menjadi 73,19 (BB);
- c. Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi 73,44 (BB);
- d. Pengawasan terhadap unit kerja Badan POM (Dit. PKP, Dit. Pengawasan Distribusi PT dan PKRT, PIOM dan BBPOM Surabaya) yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- e. Peningkatan level kapabilitas APIP melalui skema *Internal Audit Capability Model* (IACM) menjadi level 3;
- f. Integrasi manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan Manajemen Risiko.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa **secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja 2017 dan Perjanjian Kinerja 2017 dapat dicapai.**

Sebagaimana yang telah dipaparkan di awal, Inspektorat telah melaksanakan program dalam rangka mencapai tujuan strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur Badan POM.

Namun demikian, masih terdapat pencapaian 3 (tiga) sasaran yang belum optimal yaitu :

- 1) **Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM.** Kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:
 - a. penetapan target indikator sasaran tersebut belum mengacu pada *baseline* hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.
 - b. IKU untuk sebagian unit kerja masih BELUM CUKUP untuk merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai atau untuk menyimpulkan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.
 - c. IKU telah direviu secara berkala, namun hasil reviu belum sepenuhnya dimanfaatkan dan digunakan untuk perbaikan
 - d. Sistem pengukuran kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Perhitungan realisasi dan capaian kinerja masih dilakukan secara manual sehingga belum dapat menjamin validitas data kinerja.
- 2) **Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan.** Kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:
 - a. Temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM tahun 2016 sebagian besar belum ditindaklanjuti oleh satker/unit terkait.
 - b. Pelaksanaan audit Inspektorat Badan POM untuk tahun 2017 sebagian besar dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran, sehingga sebagian besar rekomendasi hasil audit belum ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait
- 3) **Meningkatkan akuntabilitas.** Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah:
 - a. Kelemahan dalam reviu dokumen terkait akuntabilitas kinerja secara berkala dan
 - b. Masih rendahnya pemanfaatan evaluasi internal dalam perbaikan organisasi.
 - c. Belum adanya pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja *yang up to date* dan pedoman atau SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat berbagai kendala dan hambatan, terutama menyangkut penambahan peran Inspektorat dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM seperti Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Koordinator Auditor Internal QMS, dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai dalam melaksanakan fungsi pengawasan di seluruh satuan kerja Badan POM dan untuk melaksanakan seluruh peran tersebut, merupakan tantangan bagi segenap personil Inspektorat. Tantangan tersebut dapat diminimalisasi melalui pembagian tugas pada masing-masing kegiatan, peningkatan kapasitas, optimalisasi peran personil dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan tugas.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2017, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Langkah dalam rangka mempertahankan capaian
 - a. Melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Mutu (QMS) Inspektorat dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - b. Memperkuat mekanisme monitoring temuan hasil audit beserta tindak lanjutnya.
 - c. Mengintensifkan upaya sosialisasi dan edukasi terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh aparatur negara.
2. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian
 - a. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja serta adanya pembagian personil sebagai penanggung jawab dalam pencapaian target kinerja.
 - b. Perlu dilakukan reviu terhadap indikator kinerja dan penentuan dasar penetapan target didasarkan pada *baseline* data yang telah ada.

- c. Perlu segera membentuk satgas/komite audit yang bertugas melakukan pengawasan/reviu kegiatan pengawasan APIP untuk meningkatkan pencapaian pada sasaran ke-6, yaitu meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern.
3. Langkah-langkah lain apabila diperlukan
 - a. Revisi terhadap target indikator sasaran 2 “Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana, dan RB” dengan memperhatikan *baseline* data hasil capaian indikator tahun 2017 dimana target RPJMN 2019 telah tercapai di tahun 2017
 - b. Revisi terhadap indikator sasaran 5 “Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien”
 - 1) Indikator 1: Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan sebaiknya dilakukan penyesuaian target dengan memperhatikan *baseline* data hasil capaian indikator tahun 2017 dibandingkan dengan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan oleh Kementerian PAN dan RB dimana target RPJMN 2019 telah tercapai di tahun 2017
 - 2) Indikator 2: Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat Waktu sebaiknya dilakukan penyesuaian target menjadi 100% untuk setiap tahunnya dikarenakan Laporan Hasil Pengawasan merupakan output dari kegiatan pengawasan yang digunakan Pimpinan Organisasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
 - 3) Indikator 3: Persentase Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) dengan Kriteria “Baik”
Sebaiknya direvisi menjadi: Persentase Evaluasi Inspektorat atas Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) dengan Kriteria “Baik”

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1



BADAN POM RI

**KEPUTUSAN INSPEKTUR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.06.02.6.04.15.0664**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2015-2019**

INSPEKTUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik



BADAN POM RI

- Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
9. Keputusan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.06.02.6.04.15.0646 tentang Rencana Strategis Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama menjadi landasan dalam melaksanakan peran pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk masa tahun 2015-2019;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja (Lapkin) Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015-2019;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk periode Renstra 2015-2019.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 April 2015
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur

Dra. Zulaimah, Apt, M.Si.
NIP.19611011 199101 2 001



BADAN POM RI

LAMPIRAN

Keputusan Inspektur Badan POM

No : HK.06.02.6.04.15.0664

Tanggal : 7 April 2015

1. Nama Unit Organisasi : **Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan**
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Fungsi :
 1. Penyiapan perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan fungsional.
 2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh unsur atau unit di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 4. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Indikator Kinerja Utama :

No.	IKU	Definisi Operasional Indikator
1.	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	Nilai Scala 1 sd 12 pada komponen proses penguatan pengawasan oleh Tim Asesor PMPRB. Kegiatan penguatan pengawasan meliputi: a) Pengendalian Gratifikasi; b) Penelusuran Pengaduan Masyarakat; c) Pengendalian <i>Whistleblowing System</i> ; d) Penanganan Benturan Kepentingan; e) Pembangunan Zona Integritas; f) Implementasi WBK/WBBM.



BADAN POM RI

2.	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	Dihitung dari kegiatan pengawasan yang dilakukan. Kegiatan pengawasan intern meliputi: a) Audit Operasional; b) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat; c) Evaluasi LAKIP; d) Review Laporan Keuangan; e) Review RKAKL; f) Monev Tindak Lanjut.
3.	Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	Data berasal dari persentase laporan hasil PM-EPITE dengan kategori minimal BAIK
4.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	Dihitung dari Hasil Pemeriksaan Semesteran (HAPSEM) BPK RI
5.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	Dihitung dari tindaklanjut atas hasil pemeriksaan internal

Lampiran 2



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42803309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat@pom.go.id, inspektorat.bpom@yahoo.com Website : inspektorat.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Zulaimah, Apt., M.Si
Jabatan : Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir.Penny K.Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan POM


Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, Januari 2017
Pihak Pertama,
Inspektur Badan POM


Dra. Zulaimah, Apt., M.Si



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat@pom.go.id, inspektorat.bpom@yahoo.com Website : inspektorat.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 INSPEKTORAT BADAN POM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1.1 Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%
		1.2 Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"	55%
2.	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	2.1 Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	75%
3.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	3.1 Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%
<i>Internal Process Perspective</i>			
4.	Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien	4.1 Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10,5
		4.2 Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	90%
		4.3 Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	80%
5.	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	5.1 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	84%
		5.2 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	76%
6.	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	6.1 Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%
<i>Learning and Growth Perspective</i>			
7.	Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	7.1 Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%
		7.2 Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34
8.	Implementasi QMS	8.1 Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO
9.	Meningkatkan akuntabilitas	9.1 Nilai SAKIP Inspektorat	81

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	Rp11.614.664.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Badan POM


Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.CPTM

Jakarta, Januari 2017
Pihak Pertama,
Inspektur


Dra. Zulaimah, Apt., M.Si

Lampiran 3

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT BADAN POM

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET							REALISASI				KETERANGAN
		Uraian	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)		
<i>Stakeholder/ Customer Perspective</i>															
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1.1. Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Bebas dari Kesalahan Material	Persentase	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
		1.2. Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"	Persentase	-	-	-	55%	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1. Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	Persentase	-	-	-	75%	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1. Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	Persentase	-	-	-	70%	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Internal process Perspective</i>															
4.	Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien	4.1. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pengawasan	Nilai Skala	-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	
		4.2. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	Persentase	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	
		4.3. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	Persentase	-	-	-	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Meningkatkan tingkat lanjut hasil pengawasan	5.1. Persentase rekonsolidasi hasil pemeriksaan yang diadakanjuri Badan POM	Persentase	-	-	-	84%	-	-	-	-	-	-	-	
		5.2. Persentase rekonsolidasi hasil pengawasan yang difinalkan/ diadakanjuri dibandingkan total rekonsolidasi yang diberikan Inspektariat	Persentase	-	-	-	76%	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	6.1. Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	Persentase	-	-	-	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				REALISASI				KETERANGAN
		Uraian	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(6)	(B)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)
7	Mengembangkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	7.1 Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja terbaik "BAIK"	Persentase	-	-	-	100%	-	-	-	-	Jumlah ASN Inspektorat yang memiliki kinerja dengan kriteria baik dibandingkan dengan seluruh ASN Inspektorat
		7.2 Jumlah ASN Inspektorat yang mengalami perubahan	Orang	-	-	-	34	-	-	-	-	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan
8	Implementasi QMS	8.1 Pemolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi	-	-	-	Sertifikasi ISO	-	-	-	-	Memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008
9	Meningkatkan akuntabilitas	9.1 Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	-	-	-	81	-	-	-	-	Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat

Learning and Growth Perspective

Keppala Badan POM

[Signature]
 Dr. P. Penny K. Lukito, MCF
 NIP.19631109 199003 2001

Jakarta, Januari 2017
 Inspektur Badan POM

[Signature]

Dra. Zulalimah, Apt., M.Si
 NIP.19611011 199101 2 001

Lampiran 4



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat@pom.go.id, inspektorat.bpom@yahoo.com Website : inspektorat.pom.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.06.02.6.01.16.0009a

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2017

INSPEKTUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Badan POM dengan Keputusan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- c. bahwa Keputusan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.06.02.6.10.15.1961 Tentang Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016 tertanggal 22 Oktober 2015 perlu direvisi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat@pom.go.id, inspektorat.bpom@yahoo.com Website : inspektorat.pom.go.id

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Keputusan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.06.02.6.01.16.0013 tentang Revisi Kedua Rencana Strategis Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2017.**
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 4 Januari 2016

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektur

Dra. Zulaimah, Apt, M.Si

NIP.19611011 199101 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat@pom.go.id, inspektorat.bpom@yahoo.com Website : inspektorat.pom.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2017

Unit Organisasi Eselon II : Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1.1 Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%
		1.2 Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"	55%
2.	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	2.1 Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	75%
3.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	3.1 Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%
<i>Internal Process Perspective</i>			
4.	Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien	4.1 Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10,5
		4.2 Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	90%
		4.3 Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	80%
5.	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	5.1 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	84%
		5.2 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	76%
6.	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	6.1 Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%
<i>Learning and Growth Perspective</i>			
7.	Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	7.1 Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%
		7.2 Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34
8.	Implementasi QMS	8.1 Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO
9.	Meningkatkan akuntabilitas	9.1 Nilai SAKIP Inspektorat	81

Jakarta, Januari 2016

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektorat

Dr. Zulaimah, Apt. M.Si
NIP. 19611011 199101 2 001

Lampiran 5

PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100,00%	100,00%	100,00
		Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP unit kerja	73,00	70,78	96,96
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	75,00%	88,70%	118,27
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70,00%	84,31%	120,44
<i>Internal Process Perspective</i>					
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan*)	10,50	11,05	105,24
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu*)	90,00%	100,00%	111,11
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"*)	80,00%	95,46%	119,32
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM*)	84,00%	82,82%	98,59
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat*)	76,00%	73,96%	97,32
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40,00%	97,98%	244,95
<i>Learning and Growth Perspective</i>					
7	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100,00
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	34	100,00
8	Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100,00
9	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	81,00	74,73	92,26

Lampiran 6

CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT

TAHUN 2017

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2017	Capaian 2017	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>										
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan	100%	-	-	100,00%	100,00%	100,00
		Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP unit kerja	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja oleh Tim Evaluator Inspektorat	Total nilai Hasil Evaluasi SAKIP	2.264,96	Total SAKIP unit kerja yang dievaluasi	32	73,00	70,78	96,96
	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	Hasil Monitoring Pencapaian <i>Road Map</i> RB	88,70%	-	-	75,00%	88,70%	118,27
	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	Persentase survei kepuasan pelanggan internal pengawasan intern dengan kriteria minimal "BAIK"	Survei kepuasan pelanggan internal pengawasan intern dengan kriteria minimal	4.269	Total Survei kepuasan pelanggan internal pengawasan intern	5.064	70,00%	84,31%	120,44

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2017	Capaian 2017	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
				baik						
Internal Process Perspective										
	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan*)	<p>Nilai Skala 1 sd 12 pada komponen proses penguatan pengawasan oleh Tim Asesor PMPRB.</p> <p>Kegiatan penguatan pengawasan meliputi:</p> <p>g) Pengendalian Gratifikasi; h) Penelusuran Pengaduan Masyarakat; i) Penedalialan Whistleblowing System; j) Penanganan Benturan Kepentingan; k) Pembangunan Zona Integritas; l) Implementasi WBK/WBBM.</p>	Nilai PMPRB bidang penguatan pengawasan	11,05	-	-	10,50	11,05	105,24
		Persentase laporan hasil pengawasan	Dihitung dari kegiatan	Laporan hasil pengawasan yang	72	Total laporan yang	72	90,00%	100,00%	111,11

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2017	Capaian 2017	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
		yang disusun tepat waktu*)	pengawasan yang dilakukan. Kegiatan pengawasan intern meliputi: g) Audit; h) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat; i) Evaluasi LAKIP; j) Review Laporan Keuangan; k) Review RKAKL; l) Monev Tindak Lanjut.	disusun tepat waktu		disusun				
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"*)	Data berasal dari persentase laporan hasil PM-EPITE dengan kategori minimal BAIK	Laporan hasil PM-EPITE dengan kategori minimal BAIK	42	Jumlah total laporan hasil PM-EPITE	44	80,00%	95,46%	119,32
	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM*)	Dihitung dari Hasil Pemeriksaan Semesteran (HAPSEM) BPK RI	Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	206	Total rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI	249	84%	82,82%	98,59

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2017	Capaian 2017	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat*)	Dihitung dari tindaklanjut atas hasil pemeriksaan internal	Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	941	Total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	1.272	76,00%	73,96%	97,32
	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	Indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi dibandingkan dengan jumlah indikator pada level 3(dari 93 indikator level 3), dengan level 2 sebagai baseline	Indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	97	Jumlah indikator pada level 3	99	40,00%	97,98%	244,95
Learning and Growth Perspective										
	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	Jumlah ASN Inspektorat yang memiliki kinerja dengan kriteria baik dibandingkan dengan seluruh ASN Inspektorat	Jumlah ASN Inspektorat yang memiliki kinerja dengan kriteria baik	37	Jumlah seluruh ASN Inspektorat	37	100%	100%	100,00
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	-	-	34	34	100,00
	Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Mempertahankan	Perolehan sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	-	-	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100,00

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2017	Capaian 2017	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
			ISO 9001:2008	9001						
	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	74,73	-	-	81,00	74,73	92,26

Lampiran 7

CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PER TRIWULAN

INSPEKTORAT

TAHUN 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)/(6)	(12) = (8)/(6)	(13) = (9)/(6)	(14) = (10)/(6)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>													
Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	--	--	--	100%	0%	100%	100%	100%	0	100	100	100
	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP unit kerja	--	--	--	73	0	0	0	70,78	95,18	95,18	95,18	96,95
Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	--	--	--	75%	69,68%	69,68%	69,68%	88,70%	92,91	92,91	92,91	118,27
Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal	--	--	--	70%	0	0	84,31%	84,31%	0	0	120,44	120,44

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)/(6)	(12) = (8)/(6)	(13) = (9)/(6)	(14) = (10)/(6)
	"BAIK"												
<i>Internal Process Control</i>													
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan*)	--	--	--	10,5	0	11,05	11,05	11,05	0	105,24	105,24	105,24
	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu*)	--	--	--	90%	24,32%	54,05%	72,97%	100%	27,03	60,06	81,08	111,111
	Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"*)	--	--	--	80%	0	0	0	95,46%	0	0	0	119,32
Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM*)	--	--	--	84%	74,08%	72,60%	72,60%	82,82%	88,19	86,43	86,43	98,59

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)/(6)	(12) = (8)/(6)	(13) = (9)/(6)	(14) = (10)/(6)
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat*)	--	--	--	76%	76,88%	76,88%	76,40%	73,96%	101,16	101,16	100,53	97,32
Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	--	--	--	40%	44,09%	44,09%	44,09%	97,98%	110,23	110,23	110,23	244,95
Learning and Growth Perspective													
Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	--	--	--	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	--	--	--	34	16	20	30	34	47,06	58,82	88,24	100
Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	--	--	--	Sertifikat ISO	-	-	-	Sertifikat ISO	0	0	0	100
Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	--	--	--	81	72,06	72,06	74,73	74,73	88,96	88,96	92,26	92,26

Lampiran 8

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2017

A. Terhadap Anggaran Sebelum Dilakukan *Self-Blocking*

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien						
			1	Review Laporan Keuangan	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	220.640.000	79.230.150	35,91	
					<u>Output:</u>				
					Laporan Hasil Review Laporan Keuangan yang disusun (lap)	6	5	83,33	
			2	Review Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKAKL)	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	256.560.000	49.852.000	19,43	
					<u>Output:</u>				
					Laporan Hasil Review Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKAKL) yang disusun (lap)	3	3	100,00	
			3	Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	<u>Input:</u>				
Dana (Rp)	94.000.000	76.306.100			81,18				
		<u>Output:</u>							
		Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (lap)	5	5	100,00				
2	Meningkatnya efektivitas	1	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)		
1	2	3	4	5	6	7		
	Organisasi, Tata Laksana, dan RB	1 Pemantauan/Evaluasi SPIP/RB di Lingkungan Badan POM	<u>Input:</u>					
			Dana (Rp)	47.164.000	34.006.750	72,10		
			<u>Output:</u>					
			Laporan hasil pemantauan/evaluasi SPIP/RB di lingkungan Badan POM yang disusun (lap)	2	2	100,00		
		2	Peningkatan program pencegahan dan pemberantasan korupsi					
		1 Sosialisasi program antikorupsi BPOM (saber pungli, benturan kepentingan, dan whistleblower)	<u>Input:</u>					
			Dana (Rp)	84.435.000	77.557.612	91,85		
			<u>Output:</u>					
			Laporan sosialisasi program antikorupsi BPOM yang disusun (lap)	5	7	140,00		
		2 Rapat evaluasi pelaksanaan program saber pungli dan benturan kepentingan	<u>Input:</u>					
			Dana (Rp)	79.660.000	13.222.000	16,60		
			<u>Output:</u>					
			Laporanevaluasi pelaksanaan program saber pungli dan benturan kepentingan yang disusun (lap)	2	1	50,00		
		3	Implementasi Reformasi Birokrasi					
		1 Evaluasi pelaksanaan RB oleh KemenPAN RB	<u>Input:</u>					
			Dana (Rp)	14.960.000	115.720.195	773,53		
<u>Output:</u>								

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Laporan persiapan evaluasi pelaksanaan RB yang disusun (lap)	1	1	100,00
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	sasaran telah tercapai				
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	1	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien			
		1	Audit Kinerja	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	1.120.235.000	555.151.984	49,56
				<u>Output:</u>		
			Laporan audit kinerja yang disusun (lap)	27	20	74,07
		2	Audit Keuangan dan pendampingan	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	1.120.235.000	825.334.316	73,68
				<u>Output:</u>		
			Laporan audit keuangan dan pendampingan yang disusun (lap)	27	27	100,00
		3	Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	238.860.000	179.964.541	75,34
				<u>Output:</u>		
			Laporan hasil klarifikasi/audit tujuan tertentu/audit investigasi yang disusun (lap)	15	14	93,33
		4	Supervisi, Bimbingan Teknis, dan Perjalanan	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	330.600.000	356.379.625	107,80

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)		
1	2	3	4	5	6	7		
			Pimpinan	<u>Output:</u>				
			Laporan hasil Supervisi, Bimbingan Teknis, dan Perjalanan Pimpinan (lap)		18	24	133,33	
		5	Survei kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)		22.120.000	21.992.900	99,43
				<u>Output:</u>				
			Laporan hasil survei kepuasan masyarakat (lap)		1	1	100,00	
		6	Probity audit (kegiatan prioritas yang terkait MDG'S/new initiative)	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)		136.980.000	0	0,00
				<u>Output:</u>				
			Laporan probabilitas audit (lap)		10	0	0,00	
		7	Penelusuran pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)		254.560.000	196.154.313	77,06
				<u>Output:</u>				
			Laporan hasil penelusuran pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang disusun (lap)		13	11	84,62	
		2	Peningkatan program pencegahan dan pemberantasan korupsi					
		1	Intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)		24.600.000	24.168.519	98,25
<u>Output:</u>								

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3		4	5	6	7	
				Laporan hasil intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM (lap)	2	3	150,00	
		2	Pembahasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan Intern	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	268.840.000	19.302.000	7,18	
				<u>Output:</u>				
				Notulen mengenai pembahasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan Intern (lap)	2	2	100,00	
		3	Public campaign Badan POM	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	50.000.000	92.574.400	185,15	
				<u>Output:</u>				
				Public campaign (pkt)	1	1	100,00	
		4	Implementasi Reformasi Birokrasi					
		1	Monitoring dan evaluasi (MONEV) pelaksanaan program reformasi birokrasi BPOM	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	202.120.000	0	0,00	
				<u>Output:</u>				
				Laporan hasil monev Reformasi Birokrasi (lap)	8	0	0,00	
		2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	107.320.000	105.647.900	98,44	
				<u>Output:</u>				
				Laporan PMPRB yang disusun (lap)	4	4	100,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)		
1	2	3	4	5	6	7		
		3	FGD Penilaian Lembar Kerja Evaluasi RB dan Konsensus	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	88.690.000	53.068.500	59,84	
				<u>Output:</u>				
				Laporan hasil FGD penilaian lembar kerja evaluasi RB dan konsensus	1	1	100,00	
		4	Sosialisasi PMPRB (Pusat)	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	55.720.000	43.633.700	78,31	
				<u>Output:</u>				
				Laporan hasil sosialisasi PMPRB (lap)	1	1	100,00	
		5	Pelatihan Assessor PMPRB	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	44.280.000	0	0,00	
				<u>Output:</u>				
				Laporan hasil pelatihan assesor PMPRB (lap)	1	0	0,00	
		5	Perencanaan Program Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan					
		1	Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan tahunan (RKPT dan PKPT)	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	12.580.000	1.883.300	14,97	
<u>Output:</u>								
Dokumen RKPT dan PKPT (lap)	1			1	100,00			
2	Pengadaan Server	<u>Input:</u>						

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3		4	5	6	7	
			Pengawasan Intern	Dana (Rp)	200.000.000	200.000.000	100,00	
				<u>Output:</u>				
				Server Pengawasan Intern (paket)	1	1	100,00	
			3	Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulanan	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	33.192.000	16.166.100	48,70
					<u>Output:</u>			
				Laporan hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulanan (lap)	12	12	100,00	
		6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran					
		1	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	259.426.000	184.463.340	71,10	
				<u>Output:</u>				
				Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12	100,00	
		2	Administrasi Kegiatan	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	438.685.000	368.929.538	84,10	
<u>Output:</u>								
		Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12	100,00			
3	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	<u>Input:</u>						
		Dana (Rp)	21.600.000	20.850.000	96,53			
		<u>Output:</u>						

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12	100,00
		7	Pengadaan Peralatan dan Mesin			
		1	Pengadaan alat pengolah data	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	229.500.000	216.893.000	94,51
			<u>Output:</u>			
			Alat pengolah data (unit)	17	17	100,00
		2	Pengadaan meubelair	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	55.000.000	66.434.000	120,79
			<u>Output:</u>			
			Meubelair (unit)	17	18	105,88
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	1	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan			
		1	Rapat evaluasi dan penyelesaian tuntutan ganti rugi	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	56.740.000	43.686.300	76,99
			<u>Output:</u>			
			Laporan hasil rapat dan penyelesaian TGR (lap)	3	2	66,67
		2	Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L terkait (Menpan,	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	102.740.000	86.237.000	83,94
			<u>Output:</u>			

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3		4	5	6	7
			BPKP, BPK)	Laporan hasil kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L terkait (lap)	1	1	100,00
		3	Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan eksternal dan internal	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	167.860.000	110.773.488	65,99
				<u>Output:</u>			
				Laporan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan eksternal dan internal (lap)	8	9	112,50
		2	Perencanaan Program Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan				
		1	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	13.064.000	2.737.900	20,96
				<u>Output:</u>			
				Laporan hasil pengawasan (lap)	2	2	100,00
		3	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				
		1	FGD Badan POM di Denpasar bersama Stakeholder	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	580.000.000	1.102.490.157	190,08
				<u>Output:</u>			
				Prosiding FGD Badan POM di Denpasar (lap)	1	1	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
		2	FGD Badan POM di Manado bersama Stakeholder	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	0	64.067.530	#DIV/0!
				<u>Output:</u>			
				Laporan penyelenggaraan FGD Badan POM di Manado bersama Stakeholder (lap)	0	1	#DIV/0!
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	1	Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pengawasan				
		1	Penyusunan Majalah Infowas	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	15.030.000	0	0,00
				<u>Output:</u>			
				Majalah Infowas (pkt)	1	0	0,00
7	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i>	1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pengawasan				
		1	Pelatihan sertifikasi auditor	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	184.250.000	132.412.844	71,87
				<u>Output:</u>			
				SDM yang mengikuti ertifikasi auditor (org)	6	7	116,67
		2	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	57.392.000	22.429.500	39,08
				<u>Output:</u>			
				Laporan penyelenggaraan PKS (lap)	2	2	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)		
1	2	3	4	5	6	7		
		3	Pelatihan/workshop/ meeting internal audit	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	409.500.000	38.500.000	9,40	
				<u>Output:</u>				
					Kegiatan pelatihan/workshop/ meeting internal audit (keg)	3	1	33,33
		4	Peningkatan Kompetensi SDM Penunjang Pengawasan (SDM di subbag ketatausahaan)	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	19.650.000	16.680.000	84,89	
				<u>Output:</u>				
					SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pengawasan (org)	3	3	100,00
		5	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	38.500.000	13.570.000	35,25	
				<u>Output:</u>				
					Laporan hasil pembinaan administrasi kepegawaian (lap)	2	2	100,00
		6	Pertemuan Learning Organization	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	155.950.000	117.520.000	75,36	
<u>Output:</u>								
			Pertemuan Learning Organization (pkt)	1	1	100,00		
7	Peningkatan Kompetensi pengawasan intern	<u>Input:</u>						
		Dana (Rp)	260.010.000	276.549.000	106,36			

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3		4	5	6	7
				<u>Output:</u>			
				SDM yang mengikuti peningkatan Kompetensi pengawasan intern (org)	35	35	100,00
		8	Administrasi Kegiatan Pengawasan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	240.600.000	234.382.700	97,42
				<u>Output:</u>			
				Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12	100,00
		9	Pemeriksaan kesehatan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	0	108.590.250	#DIV/0!
				<u>Output:</u>			
				Pemeriksaan kesehatan (pkt)	0	1	#DIV/0!
		10	Evaluasi kegiatan Inspektorat	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	0	258.228.596	#DIV/0!
				<u>Output:</u>			
				Evaluasi kegiatan Inspektorat (pkt)	0	1	#DIV/0!
		11	Evaluasi kinerja Kesektamaan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	0	73.944.170	#DIV/0!
				<u>Output:</u>			
				Evaluasi kinerja Kesektamaan (pkt)	0	1	#DIV/0!
		12	Evaluasi Kinerja Badan	<u>Input:</u>			

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3		4	5	6	7	
			POM	Dana (Rp)	0	0	#DIV/0!	
				<u>Output:</u>				
				Evaluasi Kinerja Badan POM (pkt)	0	0	#DIV/0!	
		2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
		1		<u>Input:</u>				
		Dana (Rp)		2.140.804.000	2.121.774.592	99,11		
		<u>Output:</u>						
Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12		100,00				
8	Implementasi QMS	1	Implementasi QMS					
		1	Rapat persiapan audit internal	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	10.064.000	2.264.000	22,50	
				<u>Output:</u>				
		Laporan rapat persiapan audit internal (lap)	1	1	100,00			
		2	Audit Surveilan QMS ISO 9001:2008 unit kerja pusat (Inspektorat)	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	10.064.000	4.229.500	97,19	
<u>Output:</u>								
Laporan hasil audit surveilan QMS ISO 9001:2008 (lap)	1	1	100,00					
3	Audit Internal QMS ISO 9001:2008 unit kerja	<u>Input:</u>						
		Dana (Rp)	5.032.000	4.287.000	85,19			

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3		4	5	6	7	
			pusat (Inspektorat)	<u>Output:</u>				
				Laporan hasil audit internal QMS ISO 9001:2008 (lap)	1	1	100,00	
			4	Tinjauan Manajemen Unit Kerja Inspektorat	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	5.032.000	0	0,00
		<u>Output:</u>						
					Notulen rapat tinjauan manajemen (lap)	1	0	0,00
		2	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					
		1	Workshop Internal Audit QMS Badan POM terintegrasi	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	633.722.000	318.662.500	50	
				<u>Output:</u>				
					Laporan penyelenggaraan Workshop Internal Audit QMS Badan POM terintegrasi (lap)	1	1	100,00
		2	Penilaian risiko	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	2.516.000	1.350.000	54	
				<u>Output:</u>				
					Laporan penilaian risiko (lap)	1	1	100,00
		3	Pengendalian risiko	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	2.516.000	2.336.500	93	
<u>Output:</u>								

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
			Laporan pengendalian risiko (lap)	1	1	100,00	
			4 Pemantauan SPIP Satker/Unit Mandiri	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	2.516.000	0	0
				<u>Output:</u>			
			Laporan pemantauan SPIP Satker/Unit Mandiri (lap)	1	0	0,00	
			5 Rapat Pembahasan Integrasi SPIP dan ISO 9001:2015	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	377.970.000	180.468.253	48
				<u>Output:</u>			
			Laporan Rapat Pembahasan Integrasi SPIP dan ISO 9001:2015 (lap)	1	1	100,00	
			6 Benchmarking	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	0	47.392.900	#DIV/0!
				<u>Output:</u>			
			Laporan Benchmarking (lap)	1	1	100,00	
			7 Penyusunan Modul mitigasi risiko	<u>Input:</u>			
Dana (Rp)	0	49.665.000		#DIV/0!			
<u>Output:</u>							
Laporan Penyusunan Modul mitigasi risiko (lap)	1	1	100,00				
9	Meningkatkan akuntabilitas	1	Perencanaan Program Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan				

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3		4	5	6	7
		1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Laporan Tahunan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	15.580.000	15.300.775	98,21
				<u>Output:</u>			
				Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Inspektorat TA 2016 (lap)	2	2	100,00

B. Terhadap Anggaran Setelah Dilakukan *Self-Blocking*

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3		4	5	6	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien				
		1	Review Laporan Keuangan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	81.100.000	79.230.150	97,69
				<u>Output:</u>			

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)		
1	2	3		4	5	6	8		
		1	2	Laporan Hasil Review Laporan Keuangan yang disusun (lap)	5	5	100,00		
				Review Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKAKL)	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	50.348.000	49.852.000	99,01	
					<u>Output:</u>				
				Laporan Hasil Review Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKAKL) yang disusun (lap)	3	3	100,00		
				Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	<u>Input:</u>				
					Dana (Rp)	78.440.000	76.306.100	97,28	
					<u>Output:</u>				
					Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (lap)	5	5	100,00	
				2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana, dan RB	1	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
1	Pemantauan/Evaluasi SPIP/RB di Lingkungan Badan POM	<u>Input:</u>							
		Dana (Rp)	34.200.000				34.006.750	99,43	
		<u>Output:</u>							
Laporan hasil pemantauan/evaluasi SPIP/RB di lingkungan Badan POM yang disusun (lap)	2	2	100,00						
2	Peningkatan program pencegahan dan pemberantasan korupsi								
	1	Sosialisasi program antikorupsi BPOM (saber pungli, benturan	<u>Input:</u>						
			Dana (Rp)				81.035.000	77.557.612	95,71

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3		4	5	6	8	
			kepentingan, dan whistleblower)	<u>Output:</u>				
				Laporan sosialisasi program antikorupsi BPOM yang disusun (lap)	5	7	140,00	
		2	Rapat evaluasi pelaksanaan program saber pungli dan benturan kepentingan	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	14.760.000	13.222.000	89,58	
				<u>Output:</u>				
				Laporan evaluasi pelaksanaan program saber pungli dan benturan kepentingan yang disusun (lap)	1	1	100,00	
		3	Implementasi Reformasi Birokrasi					
		1	Evaluasi pelaksanaan RB oleh KemenPAN RB	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	160.554.000	115.720.195	72,08	
				<u>Output:</u>				
				Laporan persiapan evaluasi pelaksanaan RB yang disusun (lap)	1	1	100,00	
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	sasaran telah tercapai						
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	1	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien					
		1	Audit Kinerja	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	573.775.000	555.151.984	96,75	
				<u>Output:</u>				

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3		4	5	6	8
				Laporan audit kinerja yang disusun (lap)	16	20	125,00
		2	Audit Keuangan dan pendampingan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	883.361.000	825.334.316	93,43
				<u>Output:</u>			
				Laporan audit keuangan dan pendampingan yang disusun (lap)	23	27	117,39
		3	Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	189.540.000	179.964.541	94,95
				<u>Output:</u>			
				Laporan hasil klarifikasi/audit tujuan tertentu/audit investigasi yang disusun (lap)	13	14	107,69
		4	Supervisi, Bimbingan Teknis, dan Perjalanan Pimpinan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	385.700.000	356.379.625	92,40
				<u>Output:</u>			
				Laporan supervisi, Bimbingan Teknis, dan Perjalanan Pimpinan (lap)	22	24	109,09
		5	Survei kepuasan masyarakat terkait	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	22.120.000	21.992.900	99,43

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)		
1	2	3		4	5	6	8		
			pelayanan publik	<u>Output:</u>					
				Laporan hasil survei kepuasan masyarakat (lap)	1	1	100,00		
		6	Probitas audit (kegiatan prioritas yang terkait MDG'S/new initiative)	<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	0	0	#DIV/0!		
				<u>Output:</u>					
				Laporan probabilitas audit (lap)	0	0	#DIV/0!		
		7	Penelusuran pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan	<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	198.600.000	196.154.313	98,77		
				<u>Output:</u>					
				Laporan hasil penelusuran pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang disusun (lap)	9	11	122,22		
		2	Peningkatan program pencegahan dan pemberantasan korupsi						
		1	Intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM	<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	24.600.000	24.168.519	98,25		
		<u>Output:</u>							
		Laporan hasil intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM (lap)	2	3	150,00				

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)			
1	2	3	4	5	6	8			
		2	Pembahasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan Intern	<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	40.160.000	19.302.000	48,06		
				<u>Output:</u>					
				Notulen mengenai pembahasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan Intern (lap)	2	2	100,00		
				3	Public campaign Badan POM	<u>Input:</u>			
						Dana (Rp)	93.700.000	92.574.400	98,80
		<u>Output:</u>							
				Public campaign (pkt)	1	1	100,00		
		4	Implementasi Reformasi Birokrasi						
		1	Monitoring dan evaluasi (MONEV) pelaksanaan program reformasi birokrasi BPOM	<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	0	0	#DIV/0!		
				<u>Output:</u>					
				Laporan hasil monev Reformasi Birokrasi (lap)	0	0	#DIV/0!		
		2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	105.920.000	105.647.900	99,74		
<u>Output:</u>									
		Laporan PMPRB yang disusun (lap)	4	4	100,00				
3	FGD Penilaian Lembar	<u>Input:</u>							

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)			
1	2	3		4	5	6	8			
				Kerja Evaluasi RB dan Konsensus	Dana (Rp)	53.820.000	53.068.500	98,60		
				<u>Output:</u>						
				4	Sosialisasi PMPRB (Pusat)	Laporan hasil FGD penilaian lembar kerja evaluasi RB dan consensus (lap)		1	1	100,00
						<u>Input:</u>				
					4	Sosialisasi PMPRB (Pusat)	Dana (Rp)	44.300.000	43.633.700	98,50
						<u>Output:</u>				
					5	Pelatihan Assessor PMPRB	Laporan hasil sosialisasi PMPRB (lap)	1	1	100,00
						<u>Input:</u>				
					5	Pelatihan Assessor PMPRB	Dana (Rp)	0	0	#DIV/0!
						<u>Output:</u>				
					5	Pelatihan Assessor PMPRB	Laporan hasil pelatihan assesor PMPRB (lap)	0	0	#DIV/0!
						<u>Input:</u>				
				5	Perencanaan Program Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan					
					1	Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan tahunan (RKPT dan PKPT)	<u>Input:</u>			
							Dana (Rp)	2.516.000	1.883.300	74,85
					<u>Output:</u>					
					Dokumen RKPT dan PKPT (lap)	1	1	100,00		
			2	Pengadaan Server Pengawasan Intern	<u>Input:</u>					
					Dana (Rp)	200.000.000	200.000.000	100,00		

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)		
1	2	3		4	5	6	8		
		3	Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulanan	<u>Output:</u>					
				Server Pengawasan Intern (paket)	1	1	100,00		
				<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	27.676.000	16.166.100	58,41		
				<u>Output:</u>					
			Laporan hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulanan (lap)	12	12	100,00			
		7	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran						
		1	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	199.369.000	184.463.340	92,52		
				<u>Output:</u>					
			Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12	100,00			
		2	Administrasi Kegiatan	<u>Input:</u>					
				Dana (Rp)	403.420.000	368.929.538	91,45		
				<u>Output:</u>					
	Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12	100,00					
3	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	<u>Input:</u>							
		Dana (Rp)	21.600.000	20.850.000	96,53				
		<u>Output:</u>							

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6	8
			Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12	100,00
		8	Pengadaan Peralatan dan Mesin			
		1	Pengadaan alat pengolah data	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	216.920.000	216.893.000	99,99
			<u>Output:</u>			
			Alat pengolah data (unit)	17	17	100,00
		2	Pengadaan meubelair	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	67.580.000	66.434.000	98,30
			<u>Output:</u>			
			Meubelair (unit)	17	18	105,88
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	1	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan			
		1	Rapat evaluasi dan penyelesaian tuntutan ganti rugi	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	52.440.000	43.686.300	83,31
			<u>Output:</u>			
			Laporan hasil rapat dan penyelesaian TGR (lap)	2	2	100,00
		2	Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L terkait (Menpan,	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	89.120.000	86.237.000	96,77
			<u>Output:</u>			

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3		4	5	6	8
			BPKP, BPK)	Laporan hasil kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L terkait (lap)	1	1	100,00
		3	Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan eksternal dan internal	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	122.460.000	110.773.488	90,46
				<u>Output:</u>			
				Laporan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan eksternal dan internal (lap)	8	9	112,50
		2	Perencanaan Program Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan				
		1	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	6.440.000	2.737.900	42,51
				<u>Output:</u>			
				Laporan hasil pengawasan (lap)	2	2	100,00
		3	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				
		1	FGD Badan POM di Denpasar bersama Stakeholder	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	1.249.565.000	1.102.490.157	88,23
				<u>Output:</u>			
				Prosiding FGD Badan POM di Denpasar (lap)	1	1	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3		4	5	6	8	
			2	FGD Badan POM di Manado bersama Stakeholder	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	77.525.000	64.067.530	82,64
					<u>Output:</u>			
					Laporan penyelenggaraan FGD Badan POM di Manado bersama Stakeholder (lap)	1	1	100,00
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	1	Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pengawasan					
			1	Penyusunan Majalah Infowas	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	0	0	#DIV/0!
					<u>Output:</u>			
Majalah Infowas (pkt)	0	0			#DIV/0!			
7	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i>	1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pengawasan					
			1	Pelatihan sertifikasi auditor	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	147.120.000	132.412.844	90,00
					<u>Output:</u>			
					SDM yang mengikuti sertifikasi auditor (org)	7	7	100,00
			2	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	<u>Input:</u>			
Dana (Rp)	34.300.000	22.429.500			65,39			
				<u>Output:</u>				

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3		4	5	6	8
				Laporan penyelenggaraan PKS (lap)	2	2	100,00
		3	Pelatihan/workshop/meeting internal audit	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	38.500.000	38.500.000	100,00
				<u>Output:</u>			
				Kegiatan pelatihan/workshop/meeting internal audit (keg)	1	1	100,00
		4	Peningkatan Kompetensi SDM Penunjang Pengawasan (SDM di subbag ketatausahaan)	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	16.860.000	16.680.000	98,93
				<u>Output:</u>			
				SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pengawasan (org)	3	3	100,00
		5	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	14.300.000	13.570.000	94,90
				<u>Output:</u>			
				Laporan hasil pembinaan administrasi kepegawaian (lap)	2	2	100,00
		6	Pertemuan Learning Organization	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	117.750.000	117.520.000	99,80
				<u>Output:</u>			
				Pertemuan Learning Organization (pkt)	1	1	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)				
1	2	3	4	5	6	8				
			7 Peningkatan Kompetensi pengawasan intern	<u>Input:</u>						
				Dana (Rp)	316.360.000	276.549.000	87,42			
							<u>Output:</u>			
							SDM yang mengikuti peningkatan Kompetensi pengawasan intern (org)	35	35	100,00
			8 Administrasi Kegiatan Pengawasan	<u>Input:</u>						
				Dana (Rp)	262.740.000	234.382.700	89,21			
				<u>Output:</u>						
							Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12	100,00
							9 Pemeriksaan kesehatan	<u>Input:</u>		
			Dana (Rp)	120.000.000	108.590.250	90,49				
							<u>Output:</u>			
							Pemeriksaan kesehatan (pkt)	1	1	100,00
			10 Evaluasi kegiatan Inspektorat	<u>Input:</u>						
				Dana (Rp)	304.450.000	258.228.596	84,82			
<u>Output:</u>										
Evaluasi kegiatan Inspektorat (pkt)	1	1		100,00						
11 Evaluasi kinerja Kesektamaan	<u>Input:</u>									
	Dana (Rp)	105.830.000	73.944.170	69,87						
	<u>Output:</u>									

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3		4	5	6	8	
		12	Evaluasi Kinerja Badan POM	Evaluasi kinerja Kesektamaan (pkt)	1	1	100,00	
				<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	16.664.000	0	0,00	
				<u>Output:</u>				
					Evaluasi Kinerja Badan POM (pkt)	1	0	0,00
		2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
		1			<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	2.211.275.000	2.121.774.592	95,95
					<u>Output:</u>			
					Waktu pelaksanaan (bulan)	12	12	100,00
8	Implementasi QMS	1	Implementasi QMS					
		1	Rapat persiapan audit internal	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	10.064.000	2.264.000	22,50	
				<u>Output:</u>				
			Laporan rapat persiapan audit internal (lap)	1	1	100,00		
		2	Audit Surveilan QMS ISO 9001:2008 unit kerja pusat (Inspektorat)	<u>Input:</u>				
				Dana (Rp)	4.352.000	4.229.500	42,03	
<u>Output:</u>								

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	8	
			Laporan hasil audit surveilan QMS ISO 9001:2008 (lap)	1	1	100,00	
		3	Audit Internal QMS ISO 9001:2008 unit kerja pusat (Inspektorat)	<u>Input:</u>			
			Dana (Rp)	4.352.000	4.287.000	98,51	
			<u>Output:</u>				
			Laporan hasil audit internal QMS ISO 9001:2008 (lap)	1	1	100,00	
		4	Tinjauan Manajemen Unit Kerja Inspektorat	<u>Input:</u>			
			Dana (Rp)	0	0	#DIV/0!	
			<u>Output:</u>				
			Notulen rapat tinjauan manajemen (lap)	0	0	#DIV/0!	
		2	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				
		1	Workshop Internal Audit QMS Badan POM terintegrasi	<u>Input:</u>			
			Dana (Rp)	319.956.000	318.662.500	99,60	
			<u>Output:</u>				
			Laporan penyelenggaraan Workshop Internal Audit QMS Badan POM terintegrasi (lap)	1	1	100,00	
		2	Penilaian risiko	<u>Input:</u>			
			Dana (Rp)	2.516.000	1.350.000	53,66	
			<u>Output:</u>				

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3		4	5	6	8
				Laporan penilaian risiko (lap)	1	1	100,00
		3	Pengendalian risiko	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	2.516.000	2.336.500	92,87
				<u>Output:</u>			
				Laporan pengendalian risiko (lap)	1	1	100,00
		4	Pemantauan SPIP Satker/Unit Mandiri	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	0	0	#DIV/0!
				<u>Output:</u>			
				Laporan pemantauan SPIP Satker/Unit Mandiri (lap)	0	0	#DIV/0!
		5	Rapat Pembahasan Integrasi SPIP dan ISO 9001:2015	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	218.800.000	180.468.253	82,48
				<u>Output:</u>			
				Laporan Rapat Pembahasan Integrasi SPIP dan ISO 9001:2015 (lap)	1	1	100,00
		6	Benchmarking	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	48.000.000	47.392.900	98,74
				<u>Output:</u>			
				Laporan Benchmarking (lap)	1	1	100,00
		7	Penyusunan Modul	<u>Input:</u>			

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3		4	5	6	8
			mitigasi risiko	Dana (Rp)	50.000.000	49.665.000	99,33
				<u>Output:</u>			
				Laporan Penyusunan Modul mitigasi risiko (lap)	1	1	100,00
9	Meningkatkan akuntabilitas	1	Perencanaan Program Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan				
		1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Laporan Tahunan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	15.580.000	15.300.775	98,21
				<u>Output:</u>			
				Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Inspektorat TA 2016	2	2	100,00

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp10.234.949.000

Realisasi Anggaran : Rp9.445.417.238

Lampiran 9

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN TARGET INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
		INPUT (%)	OUTPUT (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	97,86	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
	Review Laporan Keuangan	97,69	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
	Review Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKAKL)	99,01	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
	Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	97,28	100,00	1,03	1,00	0,01	Efisien
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana, dan RB	82,78	122,22	1,48	1,00	0,48	Efisien
	Pemantauan/Evaluasi SPIP/RB di Lingkungan Badan POM	99,43	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
	Sosialisasi program antikorupsi BPOM (saber pungli, benturan kepentingan, dan whistleblower)	95,71	140,00	1,46	1,00	0,46	Efisien
	Rapat evaluasi pelaksanaan program saber pungli dan benturan kepentingan	89,58	100,00	1,12	1,00	0,12	Efisien
	Evaluasi pelaksanaan RB oleh KemenPAN RB	72,08	100,00	1,39	1,00	0,39	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan						
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	94,52	108,38	1,15	1,00	0,12	Efisien
	Audit Kinerja	96,75	125,00	1,29	1,00	0,26	Efisien
	Audit Keuangan dan pendampingan	93,43	117,39	1,26	1,00	0,24	Efisien
	Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi	94,95	107,69	1,13	1,00	0,13	Efisien
	Supervisi, Bimbingan Teknis, dan Perjalanan Pimpinan	92,40	109,09	1,18	1,00	0,10	Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN TARGET INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
		INPUT (%)	OUTPUT (%)				
	Survei kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik	99,43	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
	Probity audit (kegiatan prioritas yang terkait MDG'S/new initiative)	-	-	-	-	-	Tidak terealisasi
	Penelusuran pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan	98,77	122,22	1,24	1,00	0,24	Efisien
	Intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM	98,25	150,00	1,53	1,00	0,53	Efisien
	Pembahasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan Intern	48,06	100,00	2,08	1,00	0,11	Efisien
	Public campaign Badan POM	98,80	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
	Monitoring dan evaluasi (MONEV) pelaksanaan program reformasi birokrasi BPOM	-	-	-	-	-	Tidak terealisasi
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	99,74	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien
	FGD Penilaian Lembar Kerja Evaluasi RB dan Konsensus	98,60	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
	Sosialisasi PMPRB (Pusat)	98,50	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
	Pelatihan Assessor PMPRB	-	-	-	-	-	Tidak terealisasi
	Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan tahunan (RKPT dan PKPT)	74,85	100,00	1,34	1,00	0,34	Efisien
	Pengadaan Server Pengawasan Intern	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulanan	58,41	100,00	1,71	1,00	0,71	Efisien
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	92,52	100,00	1,08	1,00	0,08	Efisien
	Administrasi Kegiatan	91,45	100,00	1,09	1,00	0,09	Efisien
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	96,53	100,00	1,04	1,00	0,04	Efisien
	Pengadaan alat pengolah data	99,99	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN TARGET INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
		INPUT (%)	OUTPUT (%)				
	Pengadaan meubelair	98,30	105,88	1,08	1,00	0,08	Efisien
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	88,26	106,67	1,21	1,00	0,09	Efisien
	Rapat evaluasi dan penyelesaian tuntutan ganti rugi	83,31	100,00	1,20	1,00	0,09	Efisien
	Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L terkait (Menpan, BPKP, BPK)	96,77	100,00	1,03	1,00	0,03	Efisien
	Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan eksternal dan internal	90,46	100,00	1,11	1,00	0,06	Efisien
	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	42,51	100,00	2,35	1,00	1,35	Efisien
	FGD Badan POM di Denpasar bersama Stakeholder	88,23	114,29	1,30	1,00	0,14	Efisien
	FGD Badan POM di Manado bersama Stakeholder	82,64	100,00	1,21	1,00	0,21	Efisien
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern						
	Penyusunan Majalah Infowas	-	-	-	-	-	Tidak terealisasi
7	Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management	92,13	100,00	1,09	1,00	0,07	Efisien
	Pelatihan sertifikasi auditor	90,00	100,00	1,11	1,00	0,11	Efisien
	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	65,39	100,00	1,53	1,00	0,53	Efisien
	Pelatihan/workshop/ meeting internal audit	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Peningkatan Kompetensi SDM Penunjang Pengawasan (SDM di subbag ketatausahaan)	98,93	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	94,90	100,00	1,05	1,00	0,05	Efisien
	Pertemuan Learning Organization	99,80	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN TARGET INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
		INPUT (%)	OUTPUT (%)				
	Peningkatan Kompetensi pengawasan intern	87,42	100,00	1,14	1,00	0,14	Efisien
	Administrasi Kegiatan Pengawasan	89,21	100,00	1,12	1,00	0,12	Efisien
	Pemeriksaan kesehatan	90,49	100,00	1,11	1,00	0,11	Efisien
	Evaluasi kegiatan Inspektorat	84,82	100,00	1,18	1,00	0,02	Efisien
	Evaluasi kinerja Kesektamaan	69,87	100,00	1,43	1,00	0,37	Efisien
	Evaluasi Kinerja Badan POM	-	-	-	-	-	Tidak terealisasi
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95,95	100,00	1,04	1,00	0,04	Efisien
8	Implementasi QMS	92,45	100,00	1,08	1,00	0,02	Efisien
	Rapat persiapan audit internal	22,50	100,00	4,45	1,00	3,45	Efisien
	Audit Surveilan QMS ISO 9001:2008 unit kerja pusat (Inspektorat)	97,19	100,00	1,03	1,00	0,03	Efisien
	Audit Internal QMS ISO 9001:2008 unit kerja pusat (Inspektorat)	98,51	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
	Tinjauan Manajemen Unit Kerja Inspektorat	-	-	-	-	-	Tidak terealisasi
	Workshop Internal Audit QMS Badan POM terintegrasi	99,60	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Penilaian risiko	53,66	100,00	1,86	1,00	0,86	Efisien
	Pengendalian risiko	92,87	100,00	1,08	1,00	0,08	Efisien
	Pemantauan SPIP Satker/Unit Mandiri	-	-	-	-	-	Tidak terealisasi
	Rapat Pembahasan Integrasi SPIP dan ISO 9001:2015	82,48	100,00	1,21	1,00	0,01	Efisien
	Benchmarking	98,74	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
	Penyusunan Modul mitigasi risiko	99,33	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
9	Meningkatkan akuntabilitas	98,21	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Laporan Tahunan	98,21	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien

Lampiran 10

SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2017

NO	NAMA BARANG	2014	2015	2016	2017
PERALATAN DAN MESIN					
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit
2	Sepeda Motor	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
3	Mesin ketik listrik	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
4	Mesin Fotocopy Electronic	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
5	Lemari Besi/Metal	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit
6	Lemari Kayu	11 unit	18 unit	18 unit	18 unit
7	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
8	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
9	Alat Penghancur Kertas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
10	LCD Projector/Infocus	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit
11	Binding Machine	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
12	Alat Perekam Suara (voice pen)	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
13	Meja Kerja Kayu	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit
14	Kursi Besi/Metal	28 unit	52 unit	52 unit	52 unit
15	Meja Rapat	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
16	Meja computer	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
17	Televisi	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit
18	Handy Cam	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
19	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13 unit	11 unit	11 unit	11 unit
20	Digital Audio Taperecorder	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
21	Camera Electronic	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
22	Slide Projector	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
23	Camera digital	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
24	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
25	Intermediate/Key Telephone	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit

26	Pesawat Telephone	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
27	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
28	Switcher Combination	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
29	Mini Komputer	1 unit	1 unit	-	-
30	P.C Unit	15 unit	19 unit	20 unit	20 unit
31	Note Book	29 unit	33 unit	31 unit	31 unit
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28 unit	31 unit	26 unit	26 unit
33	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit
34	External/Portable Hardisk	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
35	Server	1 unit	1 unit	-	-
36	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
37	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit
38	Software komputer	-	-	7 unit	1 unit

Lampiran 11

REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN INTERNAL INSPEKTORAT 2017

No	Uraian	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	Total
I	Kompetensi Auditor	1	2	308	2.631	635	
	1. Orientasi pada pelayanan	-	1	22	222	53	298
	2. Integritas	-	-	13	224	61	298
	3. Orientasi berprestasi	-	-	20	232	46	298
	4. Komitmen pada kualitas	-	-	20	225	54	299
	5. Disiplin	-	-	16	226	56	298
	6. Kerjasama dan kemitraan	-	-	18	220	60	298
	7. Pemikiran analitis	-	-	27	221	50	298
	8. Pembelajaran berkelanjutan	1	-	28	227	42	298
	9. Inovasi	-	-	46	216	36	298
	10. Dampak dan pengaruh	-	1	42	217	38	298
	11. Pencarian informasi	-	-	28	202	68	298
	12. Keahlian melakukan audit	-	-	28	199	71	298
II	Etika dan Perilaku	-	-	25	545	324	298
	1. Bersikap sopan	-	-	7	183	108	298
	2. Bersikap ramah	-	-	11	179	108	298
	3. Mampu berinteraksi dengan pegawai auditan	-	-	7	183	108	298
III	Rekomendasi Audit	2	-	26	441	127	298
	1. Dapat dilaksanakan	1	-	18	227	52	298
	2. Berkontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi	1	-	8	214	75	298
TOTAL		3	2	359	3.617	1.086	5.064
RATA-RATA		3	4	1.077	14.468	5.430	82,83

Lampiran 12

Hasil Penilaian PM-EPITE Tahun 2017

No.	Unit	Nilai
1	Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi	91,00
2	Direktorat Standardisasi Produk Terapeutik dan PKRT	97,00
3	Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT	89,00
4	Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT	97,00
5	Direktorat Pengawasan NAPZA	96,00
6	Direktorat Penilaian OT, Suplemen Makanan dan Kosmetik	92,00
7	Direktorat Standardisasi OT, Kosmetik dan Produk Komplemen	97,00
8	Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan Produk Komplemen	97,50
9	Direktorat Obat Asli Indonesia	91,00
10	Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	--
11	Direktorat Standardisasi Produk Pangan	85,00
12	Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	83,00
13	Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	--
14	Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	--
15	Biro Umum	87,00
16	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	94,00
17	Biro Perencanaan dan Keuangan	88,00
18	Biro Kerja Sama Luar Negeri	--
19	Pusat Penyidikan Obat dan Makanan	--
20	Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional	95,00
21	Pusat Informasi Obat dan Makanan	98,00
22	Pusat Riset Obat dan Makanan	95,00
23	BBPOM di Banda Aceh	--
24	BBPOM di Medan	92,00
25	BBPOM di Padang	97,00
26	BBPOM di Pekanbaru	90,00
27	BPOM di Jambi	83,00
28	BBPOM di Palembang	93,00
29	BPOM di Pangkal Pinang	97,00
30	BPOM di Batam	93,00
31	BPOM di Bengkulu	92,00
32	BBPOM di Bandar Lampung	86,00
33	BPOM di Serang	87,00
34	BBPOM di Jakarta	--
35	BBPOM di Bandung	90,00
36	BBPOM di Semarang	--
37	BBPOM di Yogyakarta	92,00
38	BBPOM di Surabaya	99,50
39	BBPOM di Denpasar	93,00
40	BBPOM di Mataram	93,00

No.	Unit	Nilai
41	BPOM di Kupang	86,00
42	BBPOM di Pontianak	91,00
43	BPOM di Palangka raya	87,27
44	BBPOM di Banjarmasin	72,00
45	BBPOM di Samarinda	99,50
46	BBPOM di Manado	--
47	BPOM di Gorontalo	87,50
48	BPOM di Palu	93,00
49	BPOM di Kendari	99,00
50	BBPOM di Makassar	--
51	BPOM di Ambon	78,00
52	BPOM di Manokwari	97,00
53	BBPOM di Jayapura	--
54	BPOM di Sofifi	92,00
55	BPOM di Mamuju	--
56	Inspektorat	85,00
RATA-RATA		91,30

Lampiran 13

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2017

No.	Unit	Nilai
1	Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi	71,51
2	Direktorat Standardisasi Produk Terapeutik dan PKRT	73,15
3	Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT	63,23
4	Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT	72,73
5	Direktorat Pengawasan NAPZA	71,52
6	Direktorat Penilaian OT, Suplemen Makanan dan Kosmetik	73,94
7	Direktorat Standardisasi OT, Kosmetik dan Produk Komplemen	71,49
8	Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan Produk Komplemen	72,69
9	Direktorat Obat Asli Indonesia	69,53
10	Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	70,83
11	Direktorat Standardisasi Produk Pangan	69,50
12	Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	71,31
13	Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	73,11
14	Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	57,11
15	Biro Umum	71,45
16	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	63,94
17	Biro Perencanaan dan Keuangan	72,17
18	Biro Kerja Sama Luar Negeri	71,74
19	Pusat Penyidikan Obat dan Makanan	71,03
20	Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional	70,60
21	Pusat Informasi Obat dan Makanan	70,02
22	Pusat Riset Obat dan Makanan	71,46
23	BBPOM di Banda Aceh	67,66
24	BBPOM di Medan	73,28
25	BBPOM di Padang	71,98
26	BBPOM di Pekanbaru	70,98
27	BPOM di Jambi	70,43
28	BBPOM di Palembang	70,62
29	BPOM di Pangkalpinang	72,99
30	BPOM di Batam	70,98
31	BPOM di Bengkulu	70,93
32	BBPOM di Bandar Lampung	72,89
33	BPOM di Serang	72,18
34	BBPOM di Jakarta	70,11
35	BBPOM di Bandung	73,66
36	BBPOM di Semarang	71,34
37	BBPOM di Yogyakarta	73,28
38	BBPOM di Surabaya	75,75
39	BBPOM di Denpasar	73,14
40	BBPOM di Mataram	72,83

No.	Unit	Nilai
41	BPOM di Kupang	62,97
42	BBPOM di Pontianak	72,75
43	BPOM di Palangkaraya	73,48
44	BBPOM di Banjarmasin	72,26
45	BBPOM di Samarinda	69,11
46	BBPOM di Manado	70,29
47	BPOM di Gorontalo	72,91
48	BPOM di Palu	69,89
49	BPOM di Kendari	72,77
50	BBPOM di Makassar	70,27
51	BPOM di Ambon	72,92
52	BPOM di Manokwari	70,47
53	BBPOM di Jayapura	71,97
54	BPOM di Sofifi	57,09
55	BPOM di Mamuju	--
56	Inspektorat	74,73
RATA-RATA		70,78

Lampiran 14*Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan
Tahun 2016 dan 2017*

No.	Unit Pelayanan	Total Nilai IKM		Kenaikan/ Penurunan
		2016	2017	
1	Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi	78,58	80,06	2,81
2	Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT	78,83	78,96	(0,04)
3	Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik:			
	- Sub Dit Penilaian Produk I (OT dan Suplemen Makanan)	85,06	77,97	85,06
	- Sub Dit Penilaian Produk II (Kosmetik)	74,11	77,54	74,11
4	Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan PK	78,16	79,44	78,16
5	Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	85,06	78,97	85,06
6	Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	80,49	80,51	80,49
7	Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional	78,70	81,02	78,70
8	Direktorat Standardisasi Pangan	79,22	78,06	79,22
9	Direktorat Standardisasi PT PKRT	77,43	83,65	77,43
10	BBPOM Banda Aceh*	85,61	78,34	(7,27)
11	BBPOM Medan	81,10	81,44	0,34
12	BBPOM Padang	77,50	74,14	(3,36)
13	BPOM Bengkulu	85,29	85,51	0,22
14	BPOM Jambi	77,72	75,58	(2,14)
15	BPOM Batam*	N/A	85,51	N/A
16	BBPOM Bandar Lampung	83,57	87,41	3,84
17	BBPOM Pekanbaru	99,20	94,71	(4,49)
18	BPOM Pangkalpinang	77,42	87,46	10,04
19	BBPOM Jakarta*	80,10	82,26	2,16
20	BBPOM Semarang*	85,79	84,87	(0,92)
21	BBPOM Yogyakarta	77,94	83,75	5,81
22	BBPOM Surabaya	88,05	86,60	(1,45)
23	BBPOM Pontianak	78,33	82,96	4,63
24	BBPOM Samarinda*	79,44	82,65	3,21
25	BBPOM Banjarmasin	82,03	88,96	6,93
26	BBPOM Mataram*	81,16	81,37	0,21
27	BBPOM Manado	83,35	75,55	(7,80)
28	BPOM Gorontalo	85,80	82,67	(3,13)
29	BPOM Kendari*	86,95	87,03	0,08
30	BPOM Palu*	77,12	74,60	(2,52)
31	BBPOM Makassar	80,69	90,01	9,32
32	BPOM Ambon*	88,72	96,38	7,66
33	BPOM Manokwari	79,32	91,54	12,22

* : Jumlah responden kurang dari 30 responden
N/A : Data tidak tersedia

Lampiran 15

**Monitoring Status Temuan Audit Inspektorat Badan POM
Tahun Audit s.d. Tahun 2017 Per 31 Des 2017**

Balai	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai	Setor	Kurang Setor (Lebih Setor)
Balai Besar POM di Banda Aceh	2013	8	20	20	0	0	4.905.133	4.905.133	-
	2014	6	17	14	3	0	6.605.000	-	6.605.000
	2016	5	18	18	0	0	20.196.121	20.223.877	(27.756)
	2017	4	9	4	4	1	-	-	-
	2017	2	5	3	2	0	-	-	-
Balai Besar POM di Bandar Lampung	2013	7	21	19	2	0	17.222.280	17.222.280	-
	2015	7	17	17	0	0	10.366.000	10.366.000	-
	2016	9	20	20	0	0	10.098.357	10.098.357	-
	2017	4	16	8	8	0	2.577.044	2.577.044	-
Balai Besar POM di Mataram	2014	6	14	11	0	3	75.879.500	75.887.500	(8.000)
	2016	6	14	9	5	0	4.692.400	4.692.400	-
Balai Besar POM Jakarta	2014	9	23	22	0	1	24.973.850	24.973.850	-
	2016	7	7	3	4	0	-	-	-
Balai POM di Gorontalo	2014	8	22	21	1	0	19.517.985	19.517.985	-
	2015	5	10	5	3	2	13.537.005	-	13.537.005
	2016	7	15	0	14	1	-	-	-
Balai POM di Sofifi	2016	8	20	0	0	20	-	-	-
	2017	5	15	4	11	0	7.359.785	-	7.359.785
Balai Besar POM di Makassar	2015	3	6	2	1	3	7.776.160	7.776.160	-
	2016	6	23	10	13	0	21.913.512	21.913.512	-

Balai	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai	Setor	Kurang Setor (Lebih Setor)
	2017	3	10	0	0	10	7.171.000	-	7.171.000
Balai Besar POM di Pekanbaru	2013	6	15	15	0	0	22.593.463	24.963.596	(2.370.133)
	2015	4	11	10	1	0	42.248.600	40.710.600	1.538.000
	2016	5	14	0	12	2	-	-	-
	2017	3	11	0	0	11	2.568.095	-	2.568.095
Balai Besar POM di Surabaya	2014	8	23	22	0	1	34.826.850	34.826.850	-
	2015	4	9	9	0	0	37.982.256	37.982.256	-
	2016	3	8	6	2	0	-	-	-
Balai Besar POM di Samarinda	2013	7	14	14	0	0	3.846.400	4.063.400	(217.000)
	2014	8	18	18	0	0	16.579.548	16.579.548	-
	2015	5	9	9	0	0	10.292.450	10.350.640	(58.190)
	2017	2	6	6	0	0	-	-	-
Balai POM di Manokwari	2013	9	17	9	5	3	29.512.627	13.194.700	16.317.927
	2015	5	23	17	6	0	24.485.170	24.485.170	-
	2017	5	16	8	7	1	7.805.600	-	7.805.600
Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik & PKRT	2015	4	4	0	0	4	-	-	-
Direktorat Penilaian Obat dan PB	2016	2	5	0	2	3	-	-	-
Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif	2016	5	9	9	0	0	-	-	-
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen	2015	3	2	0	2	0	-	-	-
Balai POM di Ambon	2015	7	7	6	1	0	42.834.750	-	42.834.750
	2016	8	15	14	1	0	4.914.206	4.914.206	(0)

Balai	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai	Setor	Kurang Setor (Lebih Setor)
	2017	5	13	7	5	1	820.400	820.400	-
BBPOM di Bandung	2014	6	15	15	0	0	110.339.378	85.127.378	25.212.000
	2016	7	18	16	2	0	1.367.294	1.367.294	-
BPOM di Bengkulu	2016	5	14	13	1	0	3.885.500	3.885.500	-
Balai Besar POM di Jayapura	2015	5	11	10	1	0	14.054.100	-	14.054.100
	2016	5	12	6	6	0	15.783.252	15.783.252	-
	2017	2	3	3	0	0	-	-	-
BPOM di Kendari	2013	9	18	17	1	0	74.315.471	74.315.471	-
	2016	7	13	8	3	2	-	-	-
	2017	3	17	7	9	2	4.850.340	488.340	4.362.000
Balai Besar POM di Medan	2015	6	6	5	1	0	2.400.000	2.400.000	-
	2016	6	12	8	4	0	1.981.111	1.981.111	-
	2017	4	4	0	2	2	-	-	-
BPOM di Palangkaraya	2016	7	11	9	0	2	6.870.400	6.870.400	-
Balai POM di Pangkalpinang	2014	7	19	18	1	0	100.426.330	65.284.594	35.141.736
	2016	7	11	11	0	0	6.085.000	6.085.000	-
	2017	7	13	5	8	0	-	-	-
Balai Besar POM di Pontianak	2016	7	13	9	3	1	4.159.000	4.159.000	-
BPOM Jambi	2014	8	17	15	2	0	9.636.200	9.636.200	-
	2015	5	13	9	4	0	24.687.000	24.687.000	-
	2016	6	15	13	0	2	13.229.500	-	13.229.500
	2017	3	7	6	1	0	4.390.000	4.390.000	-
BBPOM Manado	2016	6	22	21	1	0	23.345.011	11.035.331	12.309.680
BPOM Kupang	2017	4	9	5	3	1	12.619.946	-	12.619.946
BBPOM Banjarmasin	2014	9	25	24	0	1	44.192.693	44.192.693	-
	2015	9	11	9	2	0	8.162.792	8.162.792	-
	2016	5	19	4	4	11	-	-	-

Balai	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai	Setor	Kurang Setor (Lebih Setor)
	2017	3	7	2	4	1	-	-	-
BPOM Batam	2016	6	22	12	10	0	203.380	203.380	-
BBPOM Padang	2014	8	27	19	8	0	160.542.916	138.786.390	21.756.526
	2015	6	10	9	1	0	13.794.750	13.794.750	-
	2016	5	14	13	1	0	12.848.543	8.336.993	4.511.550
	2017	2	4	1	3	0	-	-	-
BPOM Palu	2014	9	23	23	0	0	34.749.000	34.749.000	-
	2015	5	10	10	0	0	3.320.800	3.320.800	-
	2016	7	14	14	0	0	2.720.000	2.720.000	-
	2017	5	13	13	0	0	-	-	-
BBPOM Palembang	2014	8	24	22	1	1	99.024.825	98.290.531	734.294
	2016	5	16	8	8	0	12.949.200	-	12.949.200
BBPOM Semarang	2015	3	10	10	0	0	22.858.098	22.858.098	-
	2017	5	10	10	0	0	9.611.750	9.611.750	-
BPOM Serang	2015	7	22	7	15	0	10.098.017	10.098.017	-
BBPOM Denpasar	2016	3	10	10	0	0	41.071.541	41.071.541	-
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2016	4	14	0	0	14	9.244.890	-	-
Total		528	1.272	941	225	107	1.929.368.108	1.660.186.603	259.936.615
Persentase				73,96%	17,63%	8,41%		86,05%	13,47%

Lampiran 16

Realisasi Pelatihan Pegawai Inspektorat Tahun 2017

No	Nama Diklat/Seminar/Workshop	Tanggal Pelaksanaan	Nama Peserta	Penyelenggara	Sumber Dana
1	Audit Kinerja	13 s.d 17 Februari 2017	Agung Wicaksono	Pusdiklatwas BPKP	DIPA Inspektorat
			Noviana Susanti		
			Wiwi Wiratini		
			Henri Agus K		
			Moch. Fachrul R		
2	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual untuk APIP	20 s.d 24 Februari 2017	Wiwi Wiratini	Kementerian Keuangan RI	Kementerian Keuangan RI/ DIPA Inspektorat
			Talita Arliana P		
			Liza Eka Putri		
			Istiqomah		
3	Reviu RKAKL	26 Februari s.d 3 Maret 2017	Agus Sulisno	Pusdiklatwas BPKP	DIPA Inspektorat
			Hayati Nurhistianti		
			Mahardhika H		
			Farizka Dhian W		
			Yetti Setyaningrum		
Alexander Arie					
4	Program Pengembangan Eksekutif Scenario Planning	14 Maret 2017	Nunik Ekawaty	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat
5	Tugas belajar STIA LAN (Manajemen Keuangan Negara)	Januari 2015 sd Desember 2016	Dodi Widiyanto	STIA LAN	DIPA Sestama
6	<i>Understanding Financial Statement</i>	29 s.d 31 Maret 2017	Nina Melynda D	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat
7	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	3 s.d 8 April 2017	Nunik Ekawaty	Badan POM	DIPA Sestama
8	Diklat CFra	15 s.d 19 Mei 2017	Agung Wicaksono	LPFA	DIPA Inspektorat
			Wiwi Wiratini		
9	Seminar Nasional Audit Internal	8 s.d 10 Mei 2017	Zulaimah	YPIA	DIPA Inspektorat
			Agung Wicaksono		
			Noviana Susanti		
			Ali Yudhi H		
			Agus Sulisno		
			Henri Agus K		
Moh Nur Herman S					
10	Penjenjangan Auditor Muda	2 s.d 19 Mei 2017	Moch. Fachrul R	BPKP	DIPA Inspektorat
			Wikan Yogi P		
11	Diklat CFE	29 Mei s.d 2 Juni 2017	Henri Agus K	LPFA	DIPA Inspektorat
			Talita Arliana P		

No	Nama Diklat/Seminar/Workshop	Tanggal Pelaksanaan	Nama Peserta	Penyelenggara	Sumber Dana
12	Bimtek SAKIP	2 s.d 5 Mei 2017	Agus Sulisno	Badan POM	DIPA Sestama
			Nunik Ekawaty		
13	Pembentukan Auditor Ahli	5 Juni - 25 Juli 2017	Tri Apriadi, S.Si	BPKP	DIPA Inspektorat
			Kuncoro Adi		
			Ardianto Nugroho		
			Helmi Silvia		
			Istiqomah		
			Irwan Setiawan		
			Dedi Gunawan		
			Elida Sari S Rizky Oktaviani		
14	Diklat Fungsional Tertentu Perencana	17 Juli s.d 18 Agustus 2017	Nunik Ekawaty	Bappenas	DIPA Sestama
15	Bimtek Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	28 - 29 Agustus 2017	Dodi Widiyanto	PPLC	DIPA Inspektorat
16	Bimtek Penilaian Prestasi Kerja dan Analisa Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan	12 - 13 September 2017	Devi Ari Primanti	LP2KP	DIPA Inspektorat
17	Self Assessment Penilaian Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP	23 - 27 Oktober 2017	Ristra Tyas I, S.Farm, Apt	BPKP	DIPA BPKP & Inspektorat
18	CIA (<i>Certified Internal Auditor</i>)	13 - 24 November 2017	Moh Nur Herman S	YPIA	DIPA Inspektorat
19	CRMP (<i>Certified Risk Management Profesional</i>)	20 - 24 Nopember 2017	Farizka Dhian W	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat
		20 - 24 Nopember 2017	Liza Eka Putri	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat
20	<i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>	17 - 19 Juli 2017	Moch. Fachrul Rizal		DIPA Sestama
		4 - 8 Desember 2017	Ristra Tyas I, S.Farm, Apt	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat
		4 - 8 Desember 2017	Fadhila Nurfida Hanif, S.Farm, Apt	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat
		4 - 8 Desember 2017	Brigitta Melati IO, S.Farm, Apt	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat
21	<i>Purchasing Management</i>	5-7 Desember 2017	Ana Nawati	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat
		5-7 Desember 2017	Suci Rachmayani, S.Kom	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat
22	<i>Competency Based Reqcriutment & Selection</i>	6-8 Desember 2017	Devi Ari Primanti	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat
23	<i>Effective Cost Management</i>	13-15 Desember 2017	Nina Melynda D	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat

Lampiran 17

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2017

No.	Proses	Nilai	%
1.	Manajemen perubahan	4,81	96,13%
2.	Penataan peraturan perundang-undangan	4,38	87,50%
3.	Penataan dan penguatan organisasi	6	100,00%
4.	Penataan tata laksana	4,59	91,70%
5.	Penataan sistem manajemen SDM	14,64	97,58%
6.	Penguatan akuntabilitas	5,54	92,27%
7.	Penguatan pengawasan	11,05	92,05%
8.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	5,37	89,57%
Total Proses (60)		56,36	93,93%

No.	Proses	Nilai	%
1.	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (20)	15,38	76,91%
2.	Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (10)	8,58	85,83%
3.	Kualitas pelayanan publik (10)	8,38	83,75
Total Hasil (40)		32,34	107,8%
Indeks RB (100)		88,7	